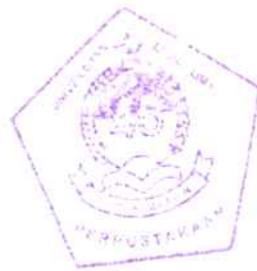


**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)
WILAYAH ACHMAD YANI
MAKASSAR**



**NAMA : MUTMAIN
STB/NIRM : 4597013090/9971110410192
JURUSAN : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS " 45 " MAKASSAR
TAHUN
2002**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Judul Skripsi : Analisis Kinerja Keuangan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Wilayah Achmad Yani Makassar

Nama : Mutmain

STB/ NIRM : 4597013090/9971110410192

Program Studi : Strata Satu (S 1)

Perguruan Tinggi : Universitas "45" Makassar

Tempat Penelitian : PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)

Menyetujui :

Konsultan I,

(Dra. Mediaty, MSi)

Konsultan II,

(Darmawati, SE, AK)

Mengetahui dan Mengesahkan :

Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas "45"**(Sukmawati Mardjuni, SE, MSi)**

Ketua Jurusan Akuntansi

(Sumatriani, SE, AK)

HALAMAN PENERIMAAN



Hari / Tanggal : Jumat, 25 Oktober 2002

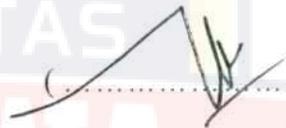
Skripsi Atas Nama : MUTMAIN

No. STB/Nirm : 4597013090/ 9971110410192

Telah diterima oleh panitia Ujian Skripsi Sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas "45" Makassar untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada Jurusan Akuntansi.

PENGAWASAN UMUM

Ir. Darwis Panguriseng, MSc
(Rektor Universitas "45" Makassar)

()

KETUA

Sukmawati Mardjuni, SE, MSi
(Dekan Fak. Ekonomi Universitas "45" Makassar)

()

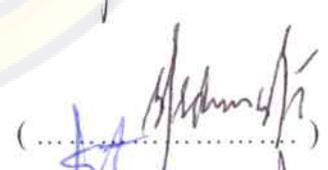
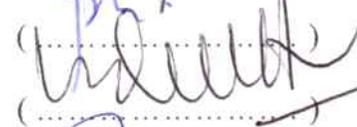
SEKRETARIS

Faridah, SE, AK

()

ANGGOTA PENGUJI :

1. **Dra. Mediaty, MSi**
2. **Drs. Kastumuni Harto, MSi, AK**
3. **Drs. Mardjuni, MSi**
4. **Darmawati, SE, AK**

()
 ()
 ()

KATA PENGANTAR



Bismillahi Rahmani Rahim

Assalamu Alaikum Warah Matullahi Wabarakatu

Alhamdulillah puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat limpahan Rahmat dan Hidayah-nya, sehingga skripsi yang sederhana ini bisa di selesaikan sebagai salah satu syarat wajib dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi Universitas "45" Makassar.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis sering menghadapi kendala, tetapi berkat Doa orang tua , serta kesabaran, ketekunan, dan kemauan untuk meraih keberhasilan , maka semua itu dapat di atasi dengan baik dan selamat.

Skripsi ini membahas tentang "Analisis Kinerja Keuangan Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)" titik akhir penulis skripsi ini tidak akan mampu di capai tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak yang telah dengan ikhlas memberikan bimbingan, petunjuk dan saran. Oleh karena itu sepantasnya penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Mediaty, SE, Msi, dan Ibu Darmawati SE, AK, selaku pembimbing I dan pembimbing II, atas kesediaan dan kerelaan hati meluangkan waktu membimbing dan memeriksa serta memberi petunjuk dalam penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
2. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi khususnya Dosen Jurusan Akutansi yang telah membekali penulis denga berbagai ilmu pengetahuan.

3. Pimpinan dan seluruh staf PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Wilayah Ahmad Yani Makassar yang telah memberikan kesempatan dan membantu dalam hal pengambilan data
4. Dan juga terima kasih kepada teman-teman dengan penuh kasih sayang, dan keikhlasan memberikan bantuan baik berupa material maupun moril, semoga segala bantuan, arahan dan didikan mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Amin.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, untuk itu sebagai insan yang menghargai Ilmu Pengetahuan, maka penulis sangat mengharapkan Kritik dan Saran demi penyempurnaan Skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga Skripsi ini dapat memberi informasi yang dapat digunakan dalam peningkatan kinerja keuangan pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Wilayah Ahmad Yani Makassar, Amin.

Makassar, Juni 2002

Penulis

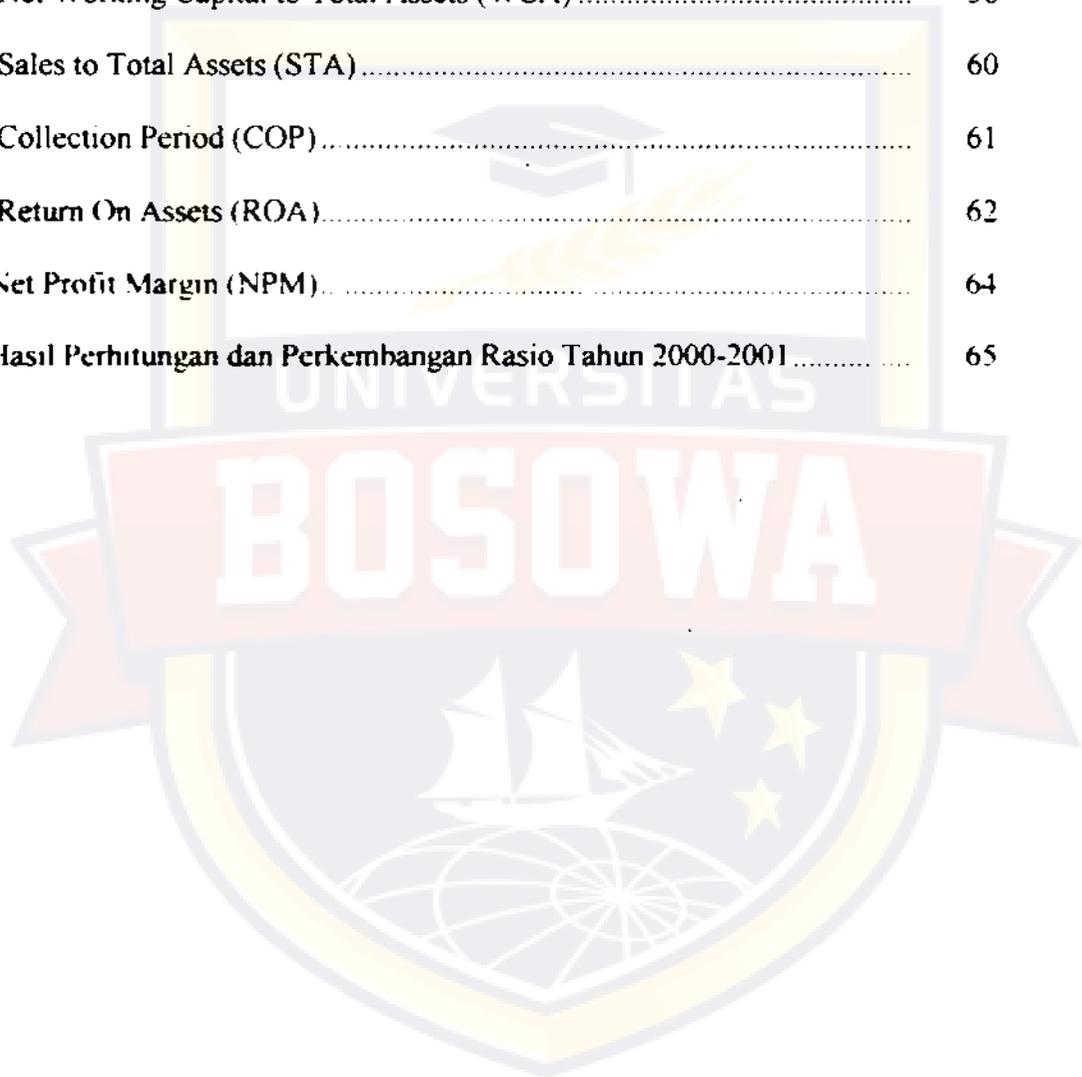
DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Masalah Pokok.....	3
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	4
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	4
1.4 Hipotesis.....	5
BAB II. KERANGKA TEORI	6
2.1 Pengertian Kinerja.....	6
2.2 Manfaat Penelitian kinerja.....	7
2.3 Konsep Penilaian Kinerja.....	8
2.4 Pengertian Manajemen.....	9

2.5	Pengertian Bank	10
2.5.1	Pengertian Neraca	11
2.5.2	Pengertian Laporan Laba Rugi	11
2.6	Pengertian Laporan Keuangan.....	12
2.7	Pengertian Analisa Laporan Keuangan	13
2.8	Analisa Rasio.....	14
2.9	Analisis Kinerja Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN Republik Indonesia Kepala Badan PembinaBUMN No:Kep-215 M-BUMN 1999	17
BAB III.	METODELOGI PENELITIAN	24
3.1	Daerah dan Waktu Penelitian.....	24
3.2	Metode Pengumpulan Data	24
3.3	Jenis dan Sumber Data.....	25
3.3.1	Jenis Data yang Digunakan	25
3.3.2	Sumber Data.....	25
3.4	Metode Analisis.....	25
3.5	Definisi Operasional.....	27
BAB IV.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
4.1	Gambaran Umum Perusahaan.....	29
4.1.1	Sejarah Singkat Perusahaan	29
4.1.2	Struktur Organisasi Perusahaan.....	35

DAFTAR TABEL

Teks	Halaman
9.1 Cash Ratio (CAR).....	57
9.2 Net Working Capital to Total Assets (WCA).....	58
9.3 Sales to Total Assets (STA).....	60
9.4 Collection Period (COP).....	61
9.5 Return On Assets (ROA).....	62
9.6 Net Profit Margin (NPM).....	64
9.7 Hasil Perhitungan dan Perkembangan Rasio Tahun 2000-2001.....	65



DAFTAR GAMBAR

TEKS

HALAMAN

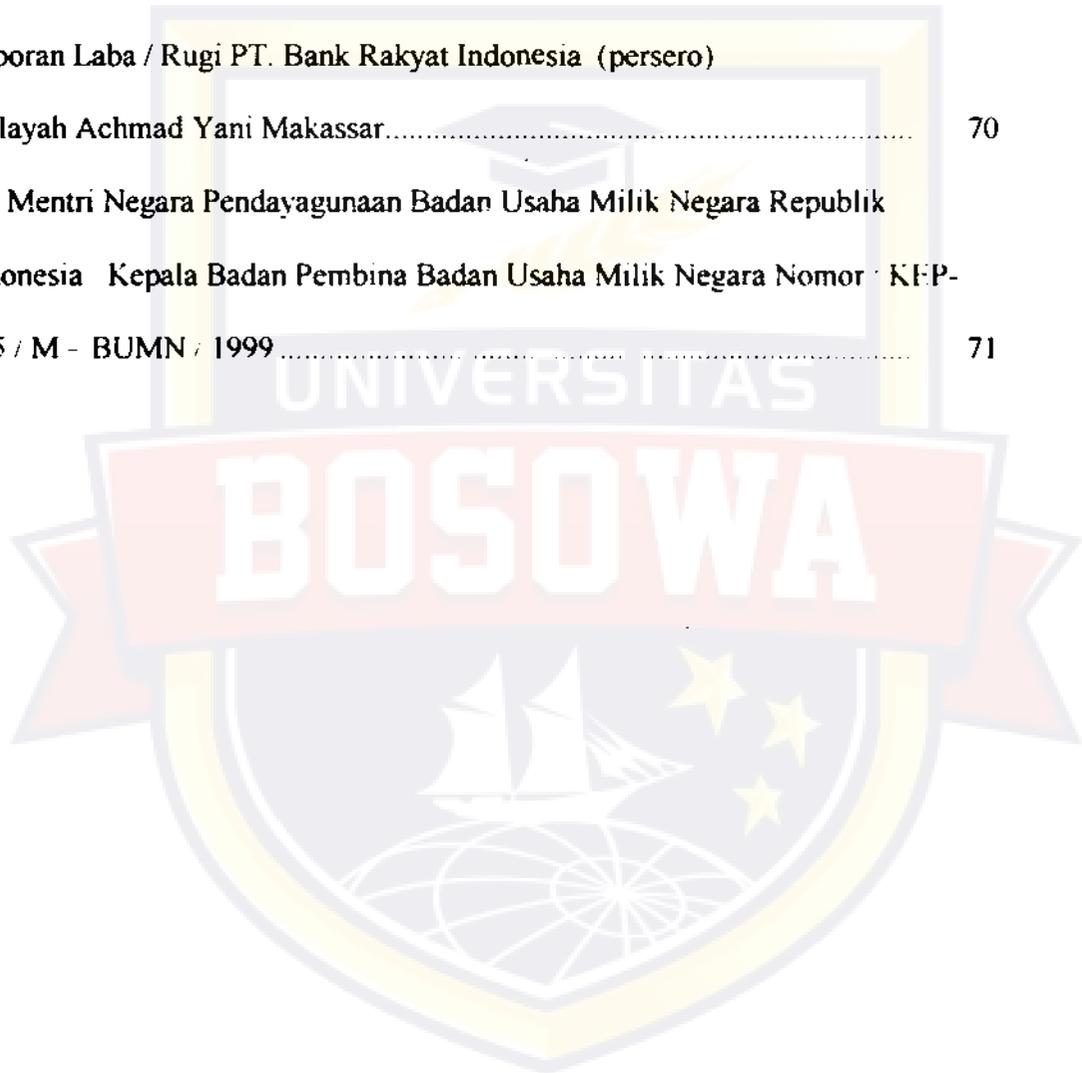
1. Struktur Organisasi PT. Bank Rakyat Indonesia (persero)

Wilayah Achmad Yani Makassar..... 35



DAFTAR LAMPIRAN

TEKS	HALAMAN
1. Neraca PT. Bank Rakyat Indonesia (persero)	
Wilayah Achmad Yani Makassar.....	69
2. Laporan Laba / Rugi PT. Bank Rakyat Indonesia (persero)	
Wilayah Achmad Yani Makassar.....	70
3. SK Mentri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Kepala Badan Pembina Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP- 215 / M - BUMN / 1999.....	71



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional dewasa ini semakin nyata dan terasa oleh lapisan masyarakat. Hal ini tercermin dalam kontribusi perusahaan baik BUMN maupun swasta dalam penyediaan rencana dan prasarana serta pajak penghasilan yang menambah penghasilan pemerintah.

Pada umumnya tujuan kinerja perusahaan dilihat dari segi kinerja keuangan dan kinerja operasional dalam mencapai laba yang maksimal dan berusaha menjamin tingkat likuiditasnya, laba yang diperoleh dalam hasil operasi setelah dikurangi dengan seluruh biaya yang diperoleh dalam periode tertentu. Tercapainya hasil yang optimal karena kejelian manajemen dalam mengelola keuangan dan mengontrol biaya, harga, jasa dan tanggung jawab dalam analisa dan ramalan tingkat laba.

Untuk memastikan bahwa tujuan perusahaan dapat tercapai, maka yang perlu dilakukan adalah pengukuran kinerja perusahaan secara periodik. kemudian kinerja tersebut dianalisa, hasil dari analisa ini, akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh pihak yang berkepentingan dalam perusahaan, hasil analisis digunakan untuk menilai sukses atau tidaknya manajemen dalam mengelola perusahaan. Bagi manajemen digunakan untuk mengevaluasi kinerja dimasa lalu, memperbaiki sistem pengawasan dan merumuskan perogram atau kebijaksanaan yang lebih efektif dan efisien. sedangkan kreditur dan investor, hasil kinerja digunakan

sebagai informasi keuangan atau sebagai alat pertimbangan dalam usaha penanaman modal, pengambilan kredit oleh calon kreditur dan sampai sejauh mana perusahaan tersebut bertahan .

Dimana kinerja perusahaan dapat dibagi menjadi dua (2) yaitu :

1. Kinerja operasi antara lain meliputi volume penjualan yang dicapai serta volume produksi.
2. Kinerja keuangan yang meliputi :
 - a. Likuiditas yakni kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban atau hutang yang segera harus dibayar.
 - b. Solvabilitas yaitu kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban atau keuangan bila perusahaan tersebut dilikuid.
 - c. Rentabilitas yaitu kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba.
 - d. Stabilitas usaha yakni kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan membayar beban bunga atas kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat dengan membayar tepat pada waktunya.

Peranan lembaga perbankan sebagai penyedian dana untuk kebutuhan pembiayaan investasi dan kebutuhan modal kerja bagi dunia usaha, dirasakan semakin meningkat disamping lembaga perbankan dituntut untuk menghimpun dana yang ada dalam masyarakat kemudian menyalurkan kembali pada dunia usaha dalam bentuk kredit.

Dengan kebijakan kreditnya, bank diharapkan dapat mendorong atau memajukan dunia usaha dan menciptakan lapangan kerja bagi perusahaan yang memerlukan dana untuk keperluan investasi, maka dituntutlah kinerja bank yang lebih profesional agar dapat memberikan kepercayaan yang baik bagi calon kreditur maupun investor.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis mengambil judul "Analisis Kinerja Keuangan Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Wilayah Achmad Yani Makassar".

1.2 Masalah Pokok

Dari latar belakang yang telah di kemukakan, maka yang menjadi masalah pokok adalah :

Apakah kinerja keuangan PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Wilayah Achmad Yani Makassar tahun 2000 dan 2001 sudah sesuai nilai target kinerja Surat Keputusan Menteri Negara pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia/kepala badan pembina usaha milik negara nomor : kep - 215/M - BUMN/1999.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian :

- a. Untuk mengetahui kinerja PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Wilayah Achmad Yani Makassar khusus aspek keuangan dengan menggunakan kriteria kinerja surat keputusan menteri negara pendayagunaan badan usaha milik negara Republik Indonesia/kepala badan pembina Badan usaha milik negara Nomor : kep -- 215/M – BUMN/1999 tentang penilaian tingkat kinerja Badan Usaha Milik Negara.
- b. Memberikan interpretasi mengenai hasil analisis Badan Usaha Milik Negara.

1.3.2. Kegunaan Penelitian :

- a. Dapat menjadi bahan pertimbangan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Wilayah Achmad Yani Makassar dalam hal penilaian kinerja dan pengambilan keputusan dimasa yang akan datang.
- b. Untuk memperluas wawasan penulis dalam disiplin ilmu yang telah dipelajari sebelumnya khusus dalam bidang keuangan.
- c. Menambah literatur dan referensi bagi pembuatan penulisan karya ilmiah lainnya dalam bidang dan objek kajian yang sama.

1.4 Hipotesis

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan masalah pokok maka hasil rumusan hipotesis adalah :

Diduga bahwa kriteria penilaian kinerja keuangan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Wilayah Achmad Yani Makassar belum sesuai dengan nilai target kriteria kinerja surat keputusan menteri negara pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia/kepala badan pembina badan usaha milik negara Nomor : kep – 215/M – BUMN/1999.



BAB II

KERANGKA TEORI

2.1 Pengertian Kinerja

Kinerja adalah hasil aktivitas yang telah dilaksanakan oleh perusahaan atau oleh suatu unit bisnis pada perusahaan tersebut untuk periode tertentu. Kinerja dapat pula diartikan sebagai kontribusi yang dapat diberikan oleh suatu bagian atau divisi terhadap pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan.

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam buku "Standar Akuntansi Indonesia (1999, PSAK) menjelaskan hubungan informasi kinerja sebagai berikut:

Informasi kinerja perusahaan, terutama profitabilitas diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan dimasa depan. Informasi fluktuasi kinerja adalah penting dalam hubungan ini, informasi kinerja bermanfaat untuk memprediksikan kapasitas perusahaan dalam menghasilkan arus deras dan sumber daya yang ada. Disamping itu, informasi tersebut juga berguna dalam perumusan pertimbangan tentang efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan tambahan sumber daya.

Kinerja perusahaan yang baik tidak hanya diukur berdasarkan kecilnya hasil usaha yang telah diraih, tetapi lebih penting dari itu adalah unsur proses yang mendukungnya, yakni:

- a. Mutu pelayanan, sekaligus mutu produk yang dilaksanakan secara terpadu
- b. Keandalan manajemen yang meliputi efisiensi dan efektivitas perusahaan

c. Prilaku etis dan kejujuran yang dimiliki perusahaan.

Pengukuran kinerja BUMN yang bertujuan untuk melayani kepentingan umum dan sosial (*Publik Utility Oriented*) identik dengan pemenuhan rencana yang secara sentralisasi dibuat oleh pemerintah. Jadi BUMN beroperasi atas dasar rencana sentral yang didasarkan pada pencapaian rencana nasional. Sedangkan pengukuran kinerja BUMN yang mempunyai tujuan memperoleh laba (*Profit Oriented*) mengandung keterbatasan yang menimbulkan keraguan akan hasil pengukuran tersebut. Artinya apakah hasil yang ada tersebut benar-benar hasil kontribusi manajemen atau bukan.

Kinerja akan menunjukkan sampai seberapa jauh efisiensi pelaksanaan kegiatan serta perkembangan perusahaan yang telah dicapai oleh manajemen. Karena manajemen disertai tanggung jawab untuk dapat memperoleh keuntungan yang memuaskan dengan sumber-sumber yang ada dalam perusahaan. Manajemen ini mengetahui apakah tujuan perusahaan yang ditetapkan dapat dicapai.

2.2 Manfaat Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja perusahaan sangatlah dibutuhkan untuk mengetahui bagaimana tingkat perkembangan perusahaan tersebut. Manfaat penilaian kinerja menurut Muliadi dan Johnny Setiawan (2001 : 153) dalam bukunya "Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen" adalah sebagai berikut :

- a. Mengelola operasi manajemen secara efektif dan efisien melalui permotivasi personal secara maksimum.

- b. Membantu pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penghargaan personal, seperti promosi, transfer dan pemberhentian.
- c. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan personal dan untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan personal.
- d. Menyediakan suatu dasar untuk mendistribusikan penghargaan.

2.3 Konsep Penilaian Kinerja

Konsep penilaian kinerja dikemukakan oleh Mulyadi dan Johny Setiawan (2001 : 363) dalam bukunya "Sistem Perencanaan dan pengendalian Manajemen" sebagai berikut :

Penentuan secara periodik efektivitas operasi suatu organisasi, bagian organisasi, dan personalnya, berdasarkan sistem standar dan kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena organisasi pada dasarnya dioperasikan oleh sumber daya manusia, maka penilaian kinerja sesungguhnya merupakan penilaian atas perilaku manusia.

Tujuan utama penilaian kinerja adalah untuk memotivasi personal dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelum, agar semua bentuk tindakan dan hasil yang diinginkan oleh organisasi, standar perilaku dapat berupa kebijakan manajemen atau rencana formal yang dituangkan dalam rencana strategi, program dan anggaran organisasi.

Penilaian kinerja digunakan untuk menemukan penilaian yang tidak semestinya dan untuk merangsang serta menegakkan perilaku yang semestinya tidak

diinginkan, melalui umpan balik (*feed back*) hasil kinerja pada waktunya serta penghargaan, baik yang bersifat intrinsik maupun ekstrinsik.

2.4 Pengertian Manajemen

Manajemen dibutuhkan oleh semua organisasi, karena tanpa manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Menurut Stoner dalam buku "Manajemen" T. Hani Handoko (1997 : 8) memberikan pengertian manajemen sebagai berikut :

“ Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan ”.

Menurut Syafaruddin Alwi (2001 :) dalam buku "Strategi Keunggulan Kompetitif" memberikan pengertian bahwa manajemen bersaing melalui sumber daya manusia dan menjalankan strategi bisnis yang berorientasi kepada *customer mods*.

Ada tiga alasan utama diperlukan manajemen, yaitu :

1. Untuk mencapai tujuan manajemen dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi dan pribadi.
2. Untuk menjaga keseimbangan diantara tujuan-tujuan yang saling bertentangan, manajemen dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi, seperti pemilik dan karyawan, maupun

kreditur, pelanggan, supplier, serikat kerja, asosiasi perdagangan, masyarakat dan pemerintah.

3. Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas, suatu organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda, salah satu cara yang umum adalah efisien dan efektivitas.

Manajemen pada dasarnya sebagai bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan (*planning*), perorganisasian (*Organizing*) penyusunan personalia atau kepegawaian (*Staffing*), pengarahan dan kepemimpinan (*leading*) dan pengawasan (*controlling*).

2.5 Pengertian Bank

Bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (*finansial intermediary*) antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus unit*), pihak-pihak yang memerlukan dana (*deficit unit*) serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Falsafah yang mendasari usaha bank adalah kepercayaan masyarakat. Hal ini tampak dari kegiatan bank yang menerima simpanan dari masyarakat yang kelebihan dana dalam bentuk giro, tabungan serta deposito berjangka dan memberikan kredit kepada pihak yang memerlukan dana.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam buku "Standar Akuntansi Indonesia (1999, PSAK NO. 31:1 3) menjelaskan bentuk laporan keuangan bank sebagai berikut :

Laporan keuangan bank harus disajikan dalam mata uang Rupiah. Dalam hal bank memiliki aktiva, kewajiban dan komitmen serta kontijensi dalam valuta asing, harus dijabarkan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah yang berlaku pada tanggal laporan. Untuk modal yang disetor dalam valuta asing dijabarkan dengan menggunakan kurs konversi bank Indonesia pada saat modal tersebut disetor (*historical rate*).

Untuk memenuhi kepentingan berbagai pihak, laporan keuangan bank harus disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan pernyataan ini, laporan keuangan bank terdiri atas :

2.51. Neraca

Neraca, yaitu laporan yang menunjukkan keadaan keuangan suatu perusahaan pada tanggal tertentu, dalam penyajiannya, aktiva dan kewajiban dalam neraca bank tidak dikelompokkan menurut lancar dan tidak lancar (*unclassified*), namun sedapat mungkin tetap disusun menurut tingkat likuiditas dan jatuh tempo.

2.5.2 Laporan Laba Rugi

Laporan Laba Rugi, yaitu laporan yang menunjukkan hasil usaha dan biaya-biaya selama periode akuntansi. Laporan Laba Rugi bank disusun dalam bentuk berjenjang (*multiple step*) yang menggambarkan pendapatan atau beban yang berasal dari kegiatan utama bank dan kegiatan lainnya.

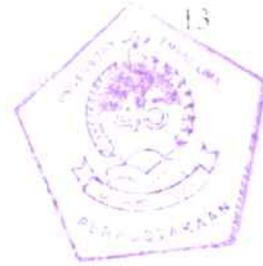
2.6 Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah produk atau hasil akhir proses akuntansi. Laporan keuangan inilah yang menjadi bahan informasi bagi para pemiliknya sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan. Disamping sebagai informasi laporan keuangan juga sebagai pertanggungjawaban atau *accountability* juga sebagai indikator kesuksesan suatu perusahaan mencapai tujuannya (Sofyan S. Harahap, 1999:20).

Menurut S. Munawir dalam bukunya "Analisa Laporan Keuangan" (1997 : 5) yang dimaksud dengan laporan keuangan adalah dua faktor yang disusun oleh akuntan pada akhir periode untuk suatu perusahaan, kedua daftar itu adalah neraca atau daftar porsi keuangan dan daftar pendapatan atau daftar rugi laba. Bila waktu akhir menambah daftar ketiga yaitu daftar surplus atau daftar laba yang tak dibagi.

Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, merupakan ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yaitu, terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Laporan keuangan ini dibuat oleh manajemen dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya oleh para pemilik perusahaan. Disamping itu laporan keuangan dapat juga digunakan untuk memahami tujuan-tujuan lain yaitu sebagai laporan kepada pihak-pihak di luar perusahaan (Zaki Baridwan, 1992 : 17).

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut porsi keuangan, kinerja serta porsi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi, (IAI 1999 : 3).



2.7 Pengertian Analisis Laporan Keuangan

Laporan keuangan suatu perusahaan perlu dianalisis karena dengan analisis tersebut akan diperoleh semua jawaban yang berhubungan dengan masalah posisi keuangan dan hasil-hasil yang dicapai oleh perusahaan. Pengertian analisis laporan keuangan adalah menghubungkan angka-angka dari data-data dalam laporan keuangan serta menjelaskan perubahan trend-nya. data keuangan akan lebih berarti bagi pihak yang berkepentingan apabila data tersebut diperbandingkan untuk dua periode atau lebih, dan analisis lebih lanjut sehingga diperoleh data yang mendukung oleh keputusan yang diambil.

Penganalisis harus mempunyai kemampuan dalam menelusuri latar belakang data keuangan, mencari hubungan dan mempelajari kecenderungan data keuangan tersebut dan menginterpretasikannya. Penganalisis juga harus mempunyai kemampuan atau kebijaksanaan yang cukup dalam mengambil suatu kesimpulan, disamping harus memperhatikan dan mempertimbangkan perubahan-perubahan kondisi perusahaan serta perusahaan tingkat harga-harga yang terjadi.

Analisa laporan keuangan meliputi penelaahan tentang hubungan dan kecenderungan atau trend untuk mengetahui apakah keadaan keuangan, hasil usaha, dan kemajuan keuangan perusahaan memuaskan atau tidak memuaskan. Analisa dilakukan dengan mengukur hubungan antara unsur-unsur laporan keuangan dan bagaimana perubahan unsur-unsur itu dari tahun ke tahun untuk mengetahui arah perkembangannya.

Data keuangan perlu disusun dan disederhanakan kemudian dianalisa dan ditafsirkan sehingga dapat memberikan informasi yang berarti bagi pihak-pihak yang menaruh perhatian pada perusahaan yang bersangkutan.

Dalam prakteknya bentuk-bentuk laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan industri dan perusahaan perdagangan tidak menunjukkan adanya keseragaman. Klasifikasi dari unsur-unsur laporan keuangan dari perusahaan yang satu dibanding perusahaan yang lain menunjukkan adanya variasi. Variasi ini timbul karena berbagai faktor, (Djarwanto Ps. : 53.). seperti : (1) tujuan manajemen menyusun laporan keuangan, (2) kegunaan lebih jauh dari pada laporan keuangan, (3) pendapat dari pihak-pihak yang menyusun laporan keuangan, (4) pengetahuan dan pengalaman dari akuntan, dan (5) ketidak keberhasilan dalam menerapkan konsep-konsep akuntansi yang telah lazim diterima umum.

2.8 Analisis Rasio

Untuk mengetahui kondisi keuangan suatu perusahaan serta perkembangannya diperlukan suatu peralatan tertentu. Alat analisis yang terpenting adalah rasio-rasio keuangan. Analisis rasio keuangan umumnya merupakan langkah pertama dalam suatu analisis keuangan.

Rasio adalah angka yang menunjukkan hubungan antara satu unsur dengan unsur lainnya dalam laporan keuangan. Analisis rasio adalah suatu teknik analisis yang menggambarkan suatu hubungan antar perimbangan antara suatu jumlah tertentu dan jumlah yang lain, yang dalam banyak hal mampu memberikan indikator dan gejala-gejala yang timbul disekitar kondisi yang melingkupinya. Analisis rasio-rasio ini

gejala yang timbul disekitar kondisi yang melingkupinya. Analisis rasio-rasio ini dapat menjelaskan atau memberi gambaran kepada analisa tentang baik buruknya posisi keungan. Posisi keungan maupun kinerja yang mencapai oleh perusahaan.

Analisis rasio keuangan orientasi kemasa depan (*puture oriented*). Oleh karena itu penganalisa harus mampu untuk menyesuaikan faktor-faktor yang ada pada periode ini dengan faktor-faktor dimasa yang akan datang yang mungkin akan mempengaruhi posisi atau manfaat suatu angka-angka rasio sepenuhnya tergantung kepada kemampuan penganalisa dalam menginterpretasikan data yang bersangkutan.

Angka-angka rasio yang dapat digolongkan atas 2 dua kelompok yaitu :

1. Berdasarkan sumber datanya
 - a. Rasio-rasio neraca adalah semua rasio yang datanya diambil atau bersumber dari neraca
 - b. Rasio laporan laba rugi adalah angka-angka rasio dalam penyusunannya semua datanya bersumber dari laporan laba rugi
 - c. Rasio-rasio antara laporan adalah semua angka rasio yang penyusunan datanya berasal dari neraca dan laporan laba rugi
2. Berdasarkan tujuan penganalisa
 - a. Rasio likuditas yaitu kemampuan perusahaan untuk memnuhi kewajiban keuangannya pada saat jatuh tempo
 - b. Rasio solvabilita: yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya biola perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya atau bila perusahaan tersebut dilikuidasi

- c. Rasio rentabilitas atau profitabilitas yaitu kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba sebelum periode tertentu
- d. Stabilitas usaha yaitu kemampuan perusahaan melakukan dengan stabil yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar beban bunga atas hutang-hutang dan membayar kembali hutangnya tetap pada teratur kepada pemegang saham (S.Minawir, 1997 : 68-69).

Menurut Mohamad Muslich dalam bukunya "Manajemen Keuangan Modern Analisis, Perencanaan dan Kebijakan" (1997 : 44). Laporan keuangan perusahaan lazimnya meliputi neraca laporan Rugi Laba dan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana. Laporan keuangan ini digunakan untuk berbagai macam tujuan. Setiap penggunaan yang berbeda membutuhkan informasi yang berbeda pula. Bank untuk dasar pemberian kredit, akan memerlukan informasi yang berbeda dengan calon investor. Demikian pula dengan pemerintahan kantor pajak atau ekonomi akan memerlukan data yang berbeda pula.

Informasi yang didasarkan pada analisis keuangan yang mencakup penelitian keadaan keuangan perusahaan baik yang telah lampau, saat sekarang ekspektasi masa depan. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengidentifikasi setiap kelemahan dari keadaan keuangan yang dapat menimbulkan masalah dimasa depan. Dan menentukan setiap kekuatan yang dapat dipergunakan. Disamping itu analisis yang dilakukan oleh pihak luar perusahaan dapat digunakan untuk menentukan tingkat kredibilitas atau potensi investasi.

Analisis rasio keuangan merupakan alat utama dalam analisis keuangan, karena analisis ini dapat digunakan untuk menjawab berbagai pertanyaan tentang keadaan keuangan perusahaan

2.9 Analisis Kinerja Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN Republik Indonesia/Kepala Badan Pembina BUMN Nomor : Kep-215-BUMN/1999.

Indikator- indikator yang digunakan dalam penilaian kinerja keuangan menurut ketentuan Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan (BUMN) Republik Indonesia/ Kepala Badan Pembina (BUMN) Nonor. Kep-215/M-BUMN/1999 sebagai berikut :

1. Cash Ratio (CAR)

Cas Ratio (CAR) adalah indikator untuk mengukur kemampuan perusahaan dengan menggunakan kas serta kas untuk membayar kewajiban jangka pendek pada saat jatuh tempo. Untuk menghitung rasio kas ini digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Cash Ratio (CAR)} = \frac{\text{Cash and short term securities}}{\text{Current liabilitis}} \times 100\%$$

Cash and short term securities adalah kas dan setara kas pada saat tertentu.

Kas dan setara kas terdiri dari :

- Kas Bank
- Deposito kurang dari 3 bulan
- Sertifikat Bank Indonesia (SBI) kurang dari 3 bulan

Current Liabilities (kewajiban jangka pendek) adalah kewajiban jangka pendek perusahaan yang diperkirakan harus dilunasi pada periode berjalan (kurang dari 1 tahun).

Besarnya nilai cash ratio (CAR) ini maksimal sebesar 5 dengan ketentuan sebagai berikut :

Apabila CAR	Nilai
CAR > 5 %	0
CAR = 5,0 % hingga 9,9 %	1
CAR = 10,0 % hingga 19,9 %	2
CAR = 20,0 % hingga 34,9 %	3
CAR = 35,0 % hingga 49,9 %	4
CAR ≥ 50,0 %	5

2. Net Working Capital To Total Assets (WCA)

Net Working Capital To Total Assets (WCA) adalah indikator untuk mengukur besarnya kontribusi modal kerja terhadap jumlah aktiva pada akhir periode.

Dalam Surat keputusan tersebut WCA dihitung dengan cara :

$$\text{Net Working Capital To} = \frac{\text{Current Assets} - \text{Current Liabilities}}{\text{Total Assets}} \times 100\%$$

Total Assets (WCA)

Dimana :

- Current assets adalah total aktiva lancar pada saat tertentu
- Current liabilities (kewajiban jangka pendek) adalah kewajiban jangka pendek perusahaan yang diperkirakan harus dilunasi pada periode berjalan (kurang dari 1 tahun)

Total assets adalah total aktiva pada saat tertentu.

Besarnya nilai Net Working Capital To Total Assets (WCA) maksimal sebesar 5 dengan ketentuan sebagai berikut :

Apabila WCA	Nilai
WCA < 0,0 %	0
WCA = 0,0 % hingga 9,9 %	1
WCA = 10,0 % hingga 19,9 %	2
WCA = 20,0 % hingga 39,9 %	3
WCA = 40,0 % hingga 59,9 %	4
WCA ≥ 60,0 %	5

3. Sales to Total Assets (STA)

Sales to Total Assets adalah indikator untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan operasi dengan memperdayakan jumlah aktiva. Untuk mendapatkan nilai STA ini digunakan rumus :

$$\text{Sales to Total Assets (STA)} = \frac{\text{Net Sales}}{\text{Average Total Asset}}$$

Dimana :

- . Pendapatan Operasi (Net Sales) adalah pendapatan yang diperoleh Perusahaan selama periode berjalan
- . Average Total Assets adalah rata-rata saldo total aktiva pada awal periode dan akhir tahun dibagi dua.

Besarnya nilai Sales to Total Assets (STA) ini maksimal 7,5 dengan ketentuan :

Apabila STA	Nilai
STA < 1,70	0,0
STA = 1,70 hingga 1,79	1,5
STA = 1,80 hingga 1,89	3,0
STA = 1,90 hingga 1,99	4,5
STA = 2,00 hingga 2,09	6,0
STA ≥ 2,10	7,5

4. Collection Period (COP)

Collection Period adalah indikator untuk mengukur jumlah rata-rata waktu yang diperlukan untuk menagih suatu tagihan. Dalam surat keputusan tersebut COP dihitung dengan cara :

$$\text{Collection Period (COP)} = \frac{\text{Receivables}}{\text{Net Sales}} \times 365 \text{ days}$$

Dimana :

- . Rata-rata piutang listrik (Receivables) adalah saldo piutang listrik awal periode ditambah saldo piutang listrik akhir periode dibagi dua.

- Pendapatan Operasi adalah pendapatan yang diperoleh perusahaan selama periode berjalan

Besarnya nilai Collection Period (COP) ini maksimal sebesar 5 dengan ketentuan sebagai berikut :

Apabila COP	Nilai
COP > 270 hari	0
COP = 210 hingga 269	1
COP = 150 hingga 209	2
COP = 90 hingga 149	3
COP = 30 hingga 89	4
COP < 30	5

5. Return On Assets (ROA)

Return On Assets adalah indikator untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan memberdayakan aktivasnya pada akhir periode. Untuk mendapatkan nilai ROA digunakan rumus :

$$\text{Return On Assets (ROA)} = \frac{\text{EBIT}}{\text{Average Total Assets}} \times 100\%$$

- EBIT (Earning before interest and taxes) adalah laba (rugi) periode berjalan sebelum dikurangi biaya bunga dan pajak
- Average Total Assets adalah rata-rata total aktiva pada awal dan akhir tahun dibagi dua

Berdasarkan nilai Return On Assets (ROA) ini maksimal sebesar 5 dengan ketentuan sebagai berikut :

Apabila ROA	Nilai
ROA < 6,55%	0
ROA = 6,55% hingga 8,19%	1
ROA = 8,20% hingga 10,23%	2
ROA = 10,24% hingga 12,79%	3
ROA = 12,80 hingga 15,99%	4
ROA ≥ 16,00	5

6. Net Profit Margin (NPM)

Net Profit Margin adalah indikator untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dari pendapatan operasi pada periode berjalan. Dalam surat keputusan tersebut Net Profit Margin dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{EBIT}}{\text{Net Sales}} \times 100\%$$

Dimana :

- EBIT (Earning before interest and taxes) adalah laba (rugi) periode berjalan sebelum dikurangi biaya bunga dan pajak
- Pendapatan operasi adalah pendapatan yang diperoleh perusahaan selama periode berjalan

Pendapatan operasi terdiri dari :

- a. Pendapatan penjualan tenaga listrik
- b. Pendapatan penyambungan pelanggan
- c. Pendapatan lain-lain

Berdasarkan nilai Net Profit Margin (NPM) ini maksimal sebesar 5 dengan ketentuan sebagai berikut :

Apanbia NPM	Nilai
NPM < 0,00 %	0
NPM = 0,00% hingga 0,99 %	1
NPM = 1,00 hingga 2,49 %	2
NPM = 2,50 hingga 3,99 %	3
NPM = 4,00 hingga 5,49 %	4
NPM ≥ 5,50	5

Adapun perincian kinerja setiap indikator menurut SK Menteri Pendayagunaan BUMN RI/Kepala Badan Pembinaan BUMN Nomor . Kep-215/M-BUMN/1999 sebagai berikut :

No	Indikator	Nilai
1	Cash Ratio (CAR)	5
2	Net Working Capital to Total Assest (WCA)	5
3	Sales to Total Assets (STA)	7,5
4	Collection Period (COP)	5
5	Return On Assets (ROA)	5
6	Net Profit Margin (NPM)	5
	Total	32,5

Nilai kinerja keuangan adalah hasil penjumlahan nilai setiap indikator, yaitu Nilai Cash Ratio + Nilai Net Working Capital to Total Assest + Nilai Sales to Total Assets + Nilai Collection Period + Nilai Return On Assets + Nilai Net Profit Margin, Yang kemudian digolongkan klasifikasi keuangan menjadi sebagai berikut :

1. Sangat sehat, bila nilai kinerja keuangan > 41,2
2. Sehat, bila nilai kinerja keuangan > 26,0 hingga 41,2
3. Kurang sehat, bila nilai kinerja keuangan > 12,4 hingga 26,0
4. Tidak sehat, bila nilai kinerja keuangan ≤ 12,4

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Daerah dan Waktu Penelitian

Dalam rangka pengumpulan data guna analisis, yang menjadi objek penelitian pada salah satu Badan Usaha Milik Negara yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Wilayah Achmad Yani Makassar kurang lebih 2 bulan lamanya.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Guna mencapai tujuan penulisan serta memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penulisan ini maka metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan cara sebagai berikut :

- a. Observasi yaitu dilakukan dengan jalan mengadakan pengamatan secara langsung pada objek yang diteliti yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Wilayah Achmad Yani Makassar.
- b. Interview yaitu dilakukan dengan jalan mengadakan wawancara dengan pimpinan perusahaan, bagian keuangan, bagian operasional serta jumlah karyawan perusahaan.
- c. Dokumentasi yaitu mengumpulkan data yang berasal dari dokumen-dokumen dan laporan tertulis lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data Kuantitatif, yaitu data laporan keuangan dan data-data yang berhubungan dengan analisis laporan keuangan.
- b. Data Kualitatif, yaitu meliputi tentang sejarah perusahaan, struktur organisasi dan lain-lain.

3.3.2 Sumber data yang akan dianalisis dalam penelitian yang bersumber dari :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari perusahaan melalui pengamatan serta wawancara dengan pihak tertentu.
- b. Data skunder, yaitu data yang diperoleh dengan berdasarkan dokumen-dokumen atas laporan perusahaan yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

3.4 Metode Analisis

Metode analisis penelitian yang digunakan adalah metode Deskriptive Comparatif (perbandingan) dengan menggunakan analisis data yaitu analisis rasio keuangan untuk mengetahui hubungan dari pos-pos tertentu dalam neraca dan laporan rugi laba secara individu atau kombinasi dari kedua laporan tersebut, sehingga dapat memberikan gambaran tentang atau posisi keuangan dan operasional suatu perusahaan apabila angka rasio tersebut dibandingkan dengan angka standar dalam hal ini surat keputusan menteri pendayagunaan badan usaha milik negara republik Indonesia/kepala badan pembina badan usaha milik negara nomor : kep-215/M-

BUMN/1997 tanggal 27 September 1999 tentang penilaian tingkat kinerja badan usaha milik negara.

Adapun metode analisis yang digunakan dalam menganalisis kinerja keuangan adalah sebagai berikut

1. Cash Ratio (CAR) = $\frac{\text{Kas / Setara Kas}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100\%$
2. Net Working Capital
To Total Assets (WCA) = $\frac{\text{Aktiva Lancar} - \text{Hutang Lancar}}{\text{Jumlah Aktiva}} \times 100\%$
3. Sales to Total Assets (STA) = $\frac{\text{Pendapatan Operasi Neto}}{\text{Rata - Rata Aktiva}}$
4. Collection Period (COP) = $\frac{\text{Rata - rata Piutang Usaha}}{\text{Pendapatan Operasi Neto}} \times 365 \text{ hari}$
5. Return On Assets (ROA) = $\frac{\text{Laba (rugi) Sebelum Pajak}}{\text{Rata - rata Jumlah Aktiva}} \times 100\%$
6. Net Profit Margin (NPM) = $\frac{\text{Laba (rugi) Sebelum Pajak}}{\text{Pendapatan Operasi neto}} \times 100\%$

3.5 Definisi Operasional

- a. Kinerja adalah hasil aktivitas yang telah dilaksanakan oleh suatu perusahaan atau oleh suatu unit bisnis pada perusahaan, sebagai kontribusi yang dapat diberikan oleh suatu bagian atau divisi terhadap pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan untuk periode tertentu.
- b. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
- c. Laporan keuangan Bank adalah merupakan produk atau hasil akhir proses akuntansi dimana laporan neraca dan laporan laba (rugi), harus disajikan dalam mata uang rupiah.
- d. Laporan Laba (rugi) menunjukkan suatu laporan keuangan bank yang menggambarkan pendapatan dan biaya operasional dan non operasional bank serta keuntungan bersih bank untuk suatu periode tertentu.
- e. Analisa Laporan Keuangan meliputi penelaahan tentang hubungan dan kecenderungan atau trend untuk mengetahui apakah keadaan keuangan, hasil usaha dan kemajuan keuangan perusahaan memuaskan atau tidak memuaskan.
- f. Analisis Kinerja Bank dapat dibagi 2 (dua) adalah sebagai berikut :
 - Analisis rasio likuiditas bank adalah analisis yang dilakukan kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban-kewajiban yang sudah jatuh tempo.

- Analisis rasio rentabilitas bank adalah alat untuk menganalisis atau mengukur efisiensi usaha profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1 Sejarah Singkat PT. Bank Rakyat Indonesia (persero)

Pada tanggal 16 Desember 1895 Raden Wiriaatmadja dan Kawan-Kawan mendirikan "De Poerwokertosche Hulp-en Spaarbank dar inlandsche Hoofden (Bank Priyayi Poerwokerto)".

Tahun 1896 W.P.D de Wolff van Westerrode, Assisten Residen Purwokerto yang menggantikan E. Sieburgh bersama A.L. Schiff mendirikan "De Poerwokertosche Hulp Spaar-en Landbouwcrediet bank" sebagai kelanjutan dari "De Poerwokertosche Hulp-en Spaarbank de inlandsche Hoofden".

Pada tahun 1898 dengan bantuan Pemerintah Hindia Belanda dimana-mana didirikan Volksbanken atau Bank Rakyat.

Awal abad ke XX Volksbanken tersebut mengalami kesulitan sehingga Pemerintah Hindia Belanda ikut campur tangan dalam perkembangan perkreditan rakyat dan sejak tahun 1904 mendirikan Dienst dervolkscredietwesen (Dinas Perkreditan Rakyat) yang membantu secara materil maupun imateril yaitu dengan tambahan modal bimbingan, Pembinaan dan Pengawasan, sehingga Perkreditan Rakyat mulai tahun 1904 menjadi Regeringszong (tugas pemerintah).

Dalam tahun 1912 dengan Stbl. 1912-393 didirikan suatu lembaga berbadan hukum dengan nama Centrale Kas yang berfungsi sebagai Bank Central bagi Volksbanken pada umumnya termasuk Bank Desa.

Sebagai akibat dari resesi dunia dalam tahun 1929-1932, banyak Volksbanken yang tidak dapat berjalan dengan baik. Untuk mengatasi kesulitan tersebut maka pada tahun 1934 dengan Stbl. 1934-82 didirikan Algemeene Volkscredietbank (AVB) yang berstatus Badan Hukum Eropa. Modal pertama berasal dari likuidasi Centrale Kas ditambah dengan kekayaan bersih dari Volksbanken tersebut. Dengan demikian Algemeene Volkscredietbank sebagai kelanjutan dari Centrale Kas merupakan integrasi dari Volksbanken.

Pada zaman pendudukan Jepang berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 tanggal 3 Oktober 1942 Algemeene Volkscredietbank di Pulau Jawa diganti namanya menjadi Syomin Ginko (Bank Rakyat).

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, maka dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1-1964 tanggal 22 pebruari 1946 ditetapkan pedirianya Bank Rakyat Indonesia yang merupakan Bank Pemeritah yang dahulu berturut-turut bernama Algemeene Volkscredietbank dan Syomin Ginko. Sementara itu pihak NICA (Nederlansche Indie Administration) di Jakarta mendirikan kembali Kantor Besar Algemeene Volkscredietbank.



Setelah Ibu kota Republik Indonesia Yogyakarta diduduki oleh Belanda pada tahun 1948, Kantor Besar Bank Rakyat Indonesia dihapuskan oleh Netherlands Indies Civil Administration . Dengan demikian sejak waktu itu kegiatan Bank Rakyat Indonesia terhenti untuk sementara .

Setelah tercapai persetujuan Roem-Royen, Kantor Besar Bank Rakyat Indonesia dihidupkan kembali akan tetapi wilayah kerjanya hanya meliputi daerah yang dikembalikan kepada Negara Republik Indonesia tahun 1945 (daerah Renvile) sedangkan didaerah lainya nama Algemeene Volkscredietbank diganti menjadi BARRIS (Bank Rakyat Republik Indonesia Serikat).

Perkembangan sejarah politik Indonesia ternyata mempunyai pengaruh terhadap perkembangan sejarah Bank Rakyat Indonesia. Dengan Surat Keputusan Menteri Kemakmuran Republik Indonesia Serikat tanggal 16 Maret 1959, Direksi Bank rakyat Indonesia Negara Bagian Republik Indonesia 1945 dipindahkan dari Yogyakarta ke Jakarta untuk dijadikan Direksi Bank Rakyat Republik Indonesia Serikat. Surat keputusan ini diprotes oleh para Federalis dengan alasan bahwa Kantor Besar Bank Rakyat Republik Indonesia Serikat itu belum merupakan realita, sehingga Menteri Kemakmuran Republik Indonesia Serikat meralatnya dengan menamakan Direksi baru itu adalah Direksi Algemeene Volkscredietbank Bank Rakyat Indonesia.

Walaupun pada tanggal 17 Agustus 1950 Negara Republik Indonesia Serikat dengan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 Negara Republik Indonesia dijadikan Negara kesatuan, akan tetapi Algemeene Volkscredietbank

baru dibubarkan pada tanggal 29 Agustus 1951 berdasarkan Undang-Undang Nomor 12-1951. Selain itu Peraturan Pemerintah Nomor 1-1946 diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25-1951 tanggal 20 April 1951 yang menjadikan Bank Rakyat Indonesia sebagai Bank Menengah.

Dengan dikeluarkan Dekrit Presiden untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, maka dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 41-1960 tanggal 26) Oktober 1960 Lembaran Negara Nomor 128-1960 dibentuk Bank Koprasi, Tani dan Nelayan (BKTN) dalam Bank mana seharusnya berturut-turut dilebur dan diintegrasikan :

1. Bank Rakyat Indonesia dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 42 tahun 1960 tanggal 26 Oktober 1960.
2. Perseroan Terbatas Bank Tani Nelayan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 43 tahun 1960 tanggal 26 Oktober 1960.
3. Nederlandsche Handel Mij (NHM) setelah dinasionalisasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1960 dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 261206/BUM II tanggal 30 Nopember 1960 diserahkan kepada Bank Koprasi, Tani Nelayan.

Belum sampai integrasi ketiga Bank Pemerintah ini dilaksanakan, semua Bank Umum Negara serta Bank Tabungan Pos berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 8 tahun 1965 tanggal 4 Juni 1965 dijadikan satu dengan Bank Indonesia.

Kebijakan Pemerintah pada waktu itu menjurus kepada terbentuknya Bank Tunggal. Bank Koprasi, Tani dan Nelayan ikut diintegrasikedalam Bank

Indonesia dengan Nama Bank Indonesia dengan Urusan Koprasi, Tani dan Nelayan berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 9 tahun 1965 dan Surat Mentri Bank Sentral Nomor 42 tahun 1965 dan Nomor 47 tahun 1965.

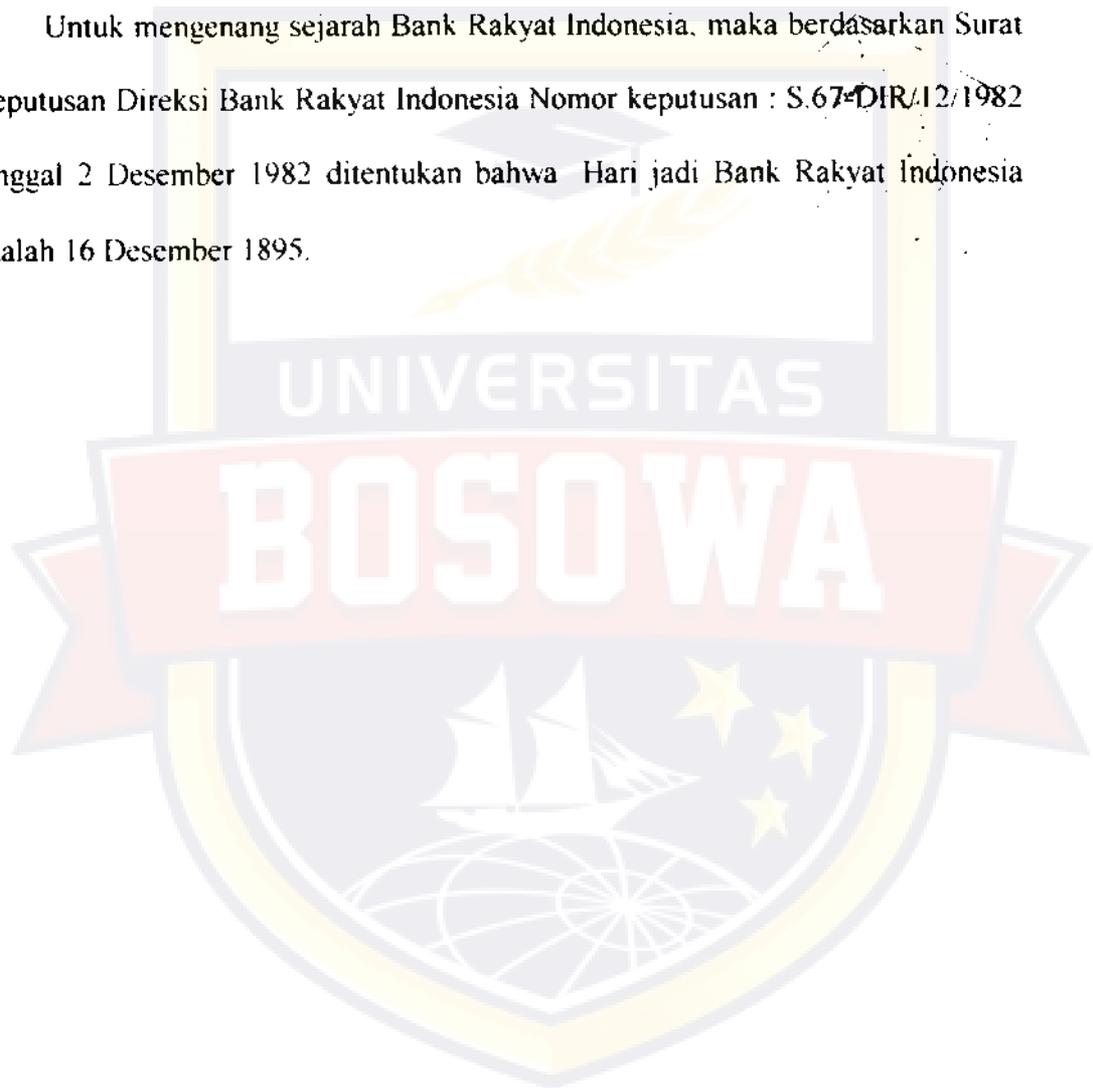
Pada waktu Penetapan Presiden tersebut baru berjalan satu bulan, dikeluarkan Penetapan Presiden Nomor 17 tahun 1965 tentang Pembentukan bank Tunggal dengan nama Bank Indonesia Urusan Koprasi, Tani dan Nelayan (ex. BKTN) diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia Unit II. Selanjutnya Bank Negara Indonesia Unit II dalam kegiatan sehari-hari ex Peleburan Bank Rakyat Indonesia dan Bank Tani dan Nelayan bekerja sama dengan nama Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Rural, sedangkan ex Nederlandsche Handel Mij bekerja dengan nama Bank Negara Indonesia unit II Bidang Ekspor Impor.

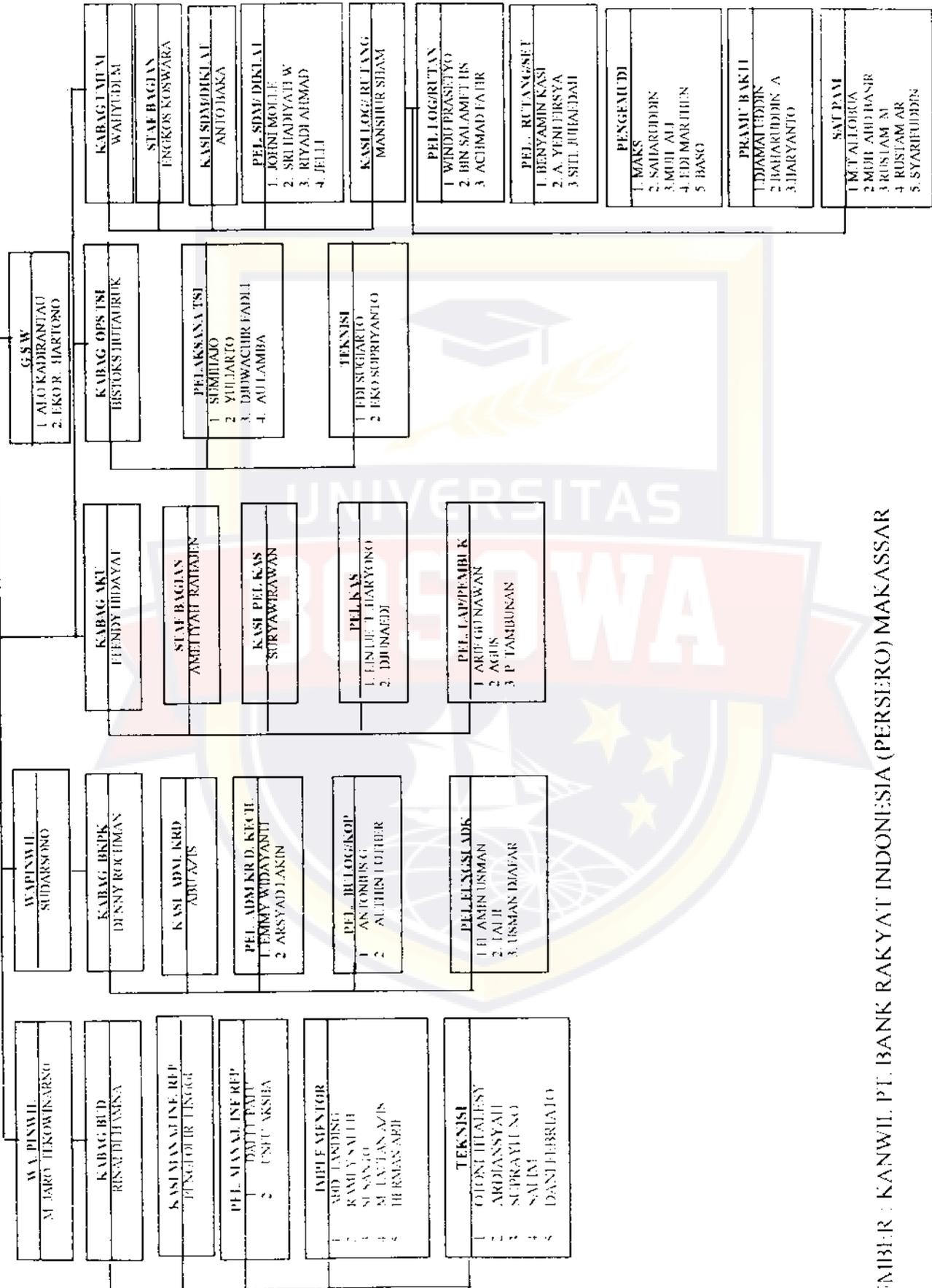
Pada akhir tahun 1968 berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1967 tentang Undang-Undang Pokok-Pokok Perbankan dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1968 tentang Undang-Undang Bank Sentral mengembalikan fungsi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral. Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Rural/Ekspor Impor dipindahkan menjadi Bank-Bank milik Negara dengan nama :

- Bank Rakyat Indonesia yang menampung segala hak dan kewajiban serta kekayaan dan perlengkapan Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Rural dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 1968.

- Bank Ekspor Impor Indonesia yang menampung segala hak dan kewajiban serta kekayaan dan perlengkapan Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Ekspor Impor dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1968.

Untuk mengenang sejarah Bank Rakyat Indonesia, maka berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Rakyat Indonesia Nomor keputusan : S.67-DIR/12/1982 tanggal 2 Desember 1982 ditentukan bahwa Hari jadi Bank Rakyat Indonesia adalah 16 Desember 1895.





Tugas Dan Tanggung Jawab Kantor Wilayah

Tugas Pokok :

Mengembangkan bisnis di wilayah secara sehat dan profesional untuk mencapai laba optimal dengan memberikan bimbingan, arahan dan dukungan kepada seluruh unit kerja di wilayahnya.

I. Tugas dan Tanggung Jawab Pemimpin wilayah (Pinwil)

1. Mengawasi pembinaan, pengembangan dan pengelolaan usaha-usaha BRI terutama yang berhubungan dengan perkreditan, dan serta jasa-jasa usaha BRI di wilayahnya.
2. Memonitor dan membina pengembangan Kantor Cabang dan BRI Unit di wilayahnya.
3. Mengidentifikasi potensi-potensi bisnis mikro, bisnis ritel dan bisnis menengah di wilayah serta menyampaikan hasilnya kepada Direktur Bisnis Mikro dan Ritel serta Direktur Bisnis Menengah.
4. Merekomendasikan usulan pembukaan, peningkatan, penurunan, penutupan termasuk relokasi Kantor Cabang dan BRI Unit wilayah kerjanya sesuai dengan pertimbangan bisnis/perubahan faktor eksternal.
5. Menjalin kerjasama dengan jajaran pemerintah daerah dan lembaga-lembaga lainnya dalam rangka pengembangan bisnis dan *corporate image* BRI.

Wewenang :

1. Memutus kredit sesuai dengan limit kewenangan yang dimiliki baik sebagai anggota Komite Kredit maupun sebagai individu.
2. Memutus suku bunga simpanan dan pinjaman sesuai batas wewenang yang dimiliki.
3. Mengeluarkan biaya promosi dan biaya lainnya sesuai kewenangannya.
4. Memprediksi PDKW kepada Pejabat Kredit Lini di Kanwil maupun Kanca sesuai dengan ketentuan yang berlaku (KUP, PPK./SE).
5. Memutus dan mengusulkan biaya kerugian karena kasus sesuai dengan kewenangannya.
6. Mengusulkan penghapusan dan pelepasan/penjualan aktiva tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

II. Tugas dan Tanggung Jawab Wakil Pemimpin Wilayah (Wapinwil)

1. Melakukan pembinaan, pengembangan dan pengelolaan usaha-usaha BRI terutama yang berhubungan yang perkreditan (mikro, ritel, program dan menengah), dana dan jasa-jasa usaha BRI di Kanca binaannya.
2. Memonitor dan membina pengembangan Kaantor Cabang dan BRI Unit dibawah binaannya.
3. Mengidentifikasi potensi-potensi bisnis yang dapat di jadikan pasar sasaran kredit mikro, ritel, program maupun menengah dan menyampaikannya kepada Pinwil

4. Merekomendasi uslan pembukaan, peningkatan, penurunan, penutupan termasuk relokasi Kanca/BRI Unit di wilayah binaannya sesuai dengan pertimbangan bisnis/perubahan faktor eksternal dan menyampaikannya kepada Pinwil.
5. Bersama / mewakili Pinwil dalam menjalin kerja sama dengan jajaran pemerintah daerah dan lembaga lainnya dalam rangka pengembangan bisnis dan *corporate image* BRI.

Wewenang Wakil Pemimpin Wilayah (Wapinwil) :

1. Memutus kredit sesuai dengan limit wewenangan yang dimiliki baik sebagai Anggota Komite Kredit maupun sebagai individu.
2. Mengeluarkan biaya promosi sesuai kewenangannya.
3. Memutus suku bangsa simpanan dan pinjaman sesuai batas wewenang yang dimiliki.
4. Memutus dan mengusulkan biaya kerugian karena kasus sesuai dengan kewenangannya.
5. Memutus dan mengusulkan penghapusan dan pelepasan/penjualan artiva tetap barang bergerak di BRI Unit sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kewenangan yang diberikan.

III. Tugas dan Tanggung Jawab AO(Acount Officer)

1. Bersama Bagian Bisnis Riter/ME. mengidentifikasi potensi-potensi yang dapat dijadikan pasar sasaran kredit riter dan menengah dan menyampaikan keada Pinwil:Wapinwil.

2. Membantu Pinwil/Wapinwil dalam menjalin kerjasama dengan pihak III dalam rangka pengembangan bisnis Ritel/Menengah.
3. Bersama Bagian Bisnis Ritel/Menengah Kanwil merumuskan Pasar Sasaran serta Kriteria Risiko yang dapat diterima untuk kredit ritel/menengah diwilayahnya.

Wewenang *Account Officer* :

1. Berkoordinasi dengan *Legal Officer* Wilayah dalam menangani kasus-kasus kredit untuk kepentingan BRI :
2. sebagai pejabat pemrakarsa kredit utusan Kanwil sesuai dengan kewenangannya.
3. Apabila diperlukan dimungkinkan untuk membantu melakukan analisis terhadap usulan kredit dan Kanca yang menjadi utusan Pinwil/Wapinwil.

IV. Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Bagian Bisnis Ritel / ME

1. Membina, mengembangkan dan mengelola usaha-usaha BRI terutama berhubungan dengan berkreditan ritel/menengah, dana dan jasa-jasa BRI di kancana binaannya .
2. Memonitor dan membina pengembangan Kantor Cabang khusus dalam bisnis Ritel/Menengah.
3. Mengurus usulan pembukaan, peningkatan, penurunan, penutupan termasuk relokasi Kanca diwilayah binaannya sesuai dengan pertimbangan bisnis/perubahan faktor eksternal dan menyampaikannya kepada pinwil/wapinwil

4. Membantu Pinwil/Wapinwil dalam menentukan & mengevaluasi sarana promosi di wilayahnya.
5. Memberikan masukan kepada Pinwil/Wapinwil dalam rangka pengembangan produk & jasa bank.

Wewenang :

1. Memberikan solusi dan pemecahan masalah kepada kanca-kanca untuk penyempurnaan, pengembangan produk kredit ritel/menengah agar dapat memberikan keuntungan optimal bagi Kanca tersebut.
2. Berkoordinasi dengan *Legal Officer* Wilayah dalam menangani kasus-kasus kredit untuk kepentingan BRI :
3. Apabila diperlukan oleh Pejabat Pemutus di Kanwil dapat berfungsi sebagai pemrakarsa kredit untuk kredit prakarsa Kanwil sesuai dengan kewenangannya dan sesuai dengan PPK yang berlaku.

V. Staf Bagian Bisnis Ritel/ME

1. Membantu Wapinwil/Kabag dalam pengembangan dan pengelolaan usaha-usaha BRI terutama yang berhubungan dengan perkreditan ritel/menengah, dana dan jasa-jasa BRI di Kanca.
2. Membantu Wapinwil/Kabag dalam memotitor dan membina pengembangan bisnis ritel/menengah di Kanca.
3. Membantu Wapinwil/Kabag dalam pengurus usulan pembukaan, peningkatan, penurunan, penutupan termasuk relokasi Kanca di wilayah binaan sesuai dengan pertimbangan bisnis/perubahan paktor eksternal.

4. Membantu Wapinwil/Kabag dalam menentukan & mengevaluasi sarana promosi di wilayahnya.
5. Memberikan masukan kepada wapinwil/kabag dalam rangka pengembangan produk & jasa bank.
6. Membantu Wapinwil/Kabag dalam pengawasan pencapaian target bisnis ritel/menengah.

VI. Fungsi/Kasie Bisnis Ritel/ME

1. Menata kerjakan/ mengadministrasikan pengelolaan usaha-usaha BRI terutama yang berhubungan dengan perkereditan ritel/menengah dan jasa-jasa BRI di Kanca.
2. Membantu Kabag Wakabag/atasan dalam memonitor dan membina pengembangan bisnis ritel/menengah di Kanca.
3. Menata kerjakan pengurusan usulan pembukaan, peningkatan, penurunan, penutupan termasuk relokasi Kanca di wilayah binaan sesuai dengan pertimbangan bisnis perubahan faktor eksternal.
4. Membantu kabag/Wakabag/atasan dalam pengawasan pencapaian target bisnis ritel/menengah.
5. Membantu Kabag Bisnis Ritel/ME menyiapkan sarana promosi di wilayahnya.
6. Membantu Kabag Bisnis Ritel/ME membantu perkembangan Produk & jasa bank

VII. Kabag/Wakabag Kredit Program

1. Membina, mengembangkan dan mengelola usaha-usaha BRI terutama yang berhubungan dengan kredit program.
2. Membantu Pinwil/Wapinwil dalam menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan lembaga lainnya dalam rangka pengembangan kredit program dan *corporate image* BRI.
3. Membantu Pinwil/Wapinwil dalam menjalin kerjasama dngan lembaga-lembaga penjamin kredit program maupun lembaga-lembaga penyandang dana kredit program.
4. Memastikan bahwa pengelolaan kredit program telah sesuai dengan RKA yang ditetapkan.
5. Melakukan komunikasi dengan Pinca, dalam rangka pencapaian target kredit program masing-masing.
6. Menyusun, menganalisis dan memoredisi penyebaran dan kualitas portofolio kredit program diwilayahnya.

Wewenang :

1. Mengusulkan penyelesaian permasalahan kredit program diwilayahnya.
2. Menolak dan atau menunda pencairan kredit program berdasarkan kesepakatan dengan instansi terkait.

VIII. Staf Kredit Program

1. Membantu Kabag dalam membina, mengembangkan dan mengelola usaha-usaha BRI terutama yang berhubungan dengan kredit program.
2. Membantu Pinwil/Wapinwil/Kabag dalam menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah, lembaga-lembaga penjamin kredit program maupun lembaga-lembaga penyanggah dan kredit program.
3. Membantu Kabag dalam pengelolaan kredit program sesuai dengan RKA yang ditetapkan.
4. Membantu Kabag dalam mengevaluasi pencapaian target kredit program masing-masing.
5. Membantu Kabag dalam menganalisis dan memprediksi penyebaran dan kualitas portofolio kredit program di wilayahnya.

IX. Fungsi/Kasie Kredit Program

1. memastikan bahwa pengelolaan kredit program telah sesuai dengan RKA yang ditetapkan.
2. Membantu Kabag/Wakabag dalam menganalisis penyebaran dan kualitas portofolio kredit program di wilayahnya.
3. Mengidentifikasi kredit program di wilayahnya yang memiliki potensi bermasalah.
4. Menyiapkan usulan restrukturisasi & penyelesaian kredit program bermasalah Kanwil Kanca.

5. Memnyiapkan usulan ke Kanpus untuk menghapusbukuan kredit program diwilayah binaannya sesuai ketentuan yang berlaku berdasarkan masukan Grup RPKB.

X. Kabag/Wakabag Mikro

1. Membantu Pinwil/Wapinwil dalam mengawasi pembinaan, pebgembangan dan pengelolaan usaha-usaha BRI terutama yang berhubungan dengan perkreditan Mikro, simpanan dan jasa-jasa BRI di BRI Unit melalui Kanca BRI terkait.
2. Memonitor dan membina pengembangan BRI unit melalui Kanca BRI tekait.
3. Mengidentifikasi potensi-potensi bisnis yang dapat dijadikan pasar sasaran bisnis mikro dan menyampaikannya kepada Pinwil/Wapinwil.
4. Memproses usulan pembukaan, peningkatan, penurunan, penutupan termasuk relokasi BRI Unit di wilayah binaannya sesuai dengan pertimbangan bisnis/perubahan faktor ekstmal dan menyampaikannya kepada Pinwil/Wapinwil.
5. Membantu Pinwil/Wapinwil dalam menjalin kerjasama dengan jajaran pemerintah daerah dan lembaga lainnya dalam rangka pengembangan bisnis mikro dan *corporate Image* BRI.

Wewenang :

- I Mengusulkan sesuai dengan kewenangannya dalam kaitan dengan :
 - a. Promosi, mutasi dan demosi perkerja Mikro di kanwil maupun BRI Unit.
 - b. Pemberian *reward* dan *punishment*.

2. Menandatangani surat-surat keluar bersama Pinwil/Wapinwil

XI. Staf Bagian Mikro

1. Membantu Pinwil/Wapinwil/Kabag/Wakabag dalam mengawasi pengelolaan usaha-usaha BRI terutama yang berhubungan dengan simpanan, perkreditan Mikro, dan jasa-jasa BRI di BRI Unit melalui Kanca BRI terkait.
2. Membantu Kabag/Wakabag dalam memonitor pengembangan BRI Unit melalui Kanca BRI terkait.
3. Mengidentifikasi potensi-potensi bisnis yang dapat pasar sasaran serta kriteria risiko yang dapat diterima untuk kredit mikro di wilayahnya.

XII. Fungsi/Kasie Bisnis Mikro

1. Menata kerjakan Pengelolaan Usaha-usaha BRI terutama yang berhubungan dengan simpanan, perkreditan Mikro dan jasa-jasa BRI di wilayahnya.
2. Membantu Kabag/Wakabag dalam memonitor dan membina pengembangan BRI Unit.
3. Membantu Kabag/Wakabag dalam menyiapkan usulan pembukaan, peningkatan, penurunan, penutupan termasuk relokasi BRI Unit di Wilayah binaannya sesuai dengan pertimbangan bisnis/perubahan faktor eksternal.
4. Memastikan bahwa pengelolaan bisnis mikro telah sesuai dengan RKA yang diterapkan.

XIII. Kabag/Wakabag Bagian Umum

1. Mengimplementasikan kebijakan SDM dari Kanpus di wilayahnya.
2. Memonitor kedisiplinan pekerja Kanwil antara lain melalui daftar hadir

3. Mengelola berkas pekerja sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Memutus biaya personalia sesuai kewenangannya.
5. Mengawasi pembuatan laporan yang terkait dengan SDM Kanwil, Kanca & BRI Unit.
6. Membantu Pinwil/Wapinwil dalam bidang kehumasan.

Wewenang :

1. Melaksanakan rekrutmen pekerja sesuai dengan kewenangan kanwil.
2. Melaksanakan *reward* dan *punishment system*, analisis jabatan, administrasi kepegawaian, penerbitan SK mutasi, promosi, hukuman jabatan sesuai dengan kewenangan kanwil.
3. Memutus biaya yang berkaitan dengan logistik sesuai kewenangannya.

XIV. Staf Bagian Umum

1. Mengimplementasikan kebijakan SDM dari Kanpus di wilayahnya.
2. Mengelola berkas pekerja sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Membuat laporan yang terkait dengan SDM Kanwil, Kanca & BRI Unit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Membantu Kabag/Wakabag dibidang kehumusan.

XV. Fungsi/Kasie Sumber Daya Manusia

1. Mmberikan pelayanan di bidang SDsM kepada pekerja yang meliputi : sistem pengembangan SDM, rekrutment pekerja, *reward* dan *punishment system*, analisis jabatan, administrasi kepegawaian (pembayaran gaji, uang cuti, dll).
2. Menginventarisir kebutuhan pendidikan pejabat pekerja lainnya.

3. Bekerjasama dengan unit kerja terkait dalam mempersiapkan kelengkapan sarana dan prasarana pelaksanaan pendidikan yang dilaksanakan di Wilayah setempat.
4. Melaksanakan pemanggilan peserta pendidikan melalui unit kerja masing-masing peserta.

XVI. Fungsi/Kasie Logistik

1. Memberikan pelayanan dibidang logistik yang meliputi : pengadaan tanah dan bangunan, pengadaan peralatan kantor dan ATK, pengadaan kendaraan dan pengadaan mebelair kantor.
2. Mengidentifikasi kebutuhan logistik di wilayahnya.
3. Melakuakan pengadaan barang sesuai dengan kewenangan yang diberikan.
4. Mengadministrasikan Aktiva tetap/ Inventaris Kanwil.
5. Memelihara/merawat Aktiva tetap dan Inventaris Kanwil.

XVII. Fungsi/Kasie Rumah Tangga

1. Mengatur penyelenggaraan pertemuan-pertemuan resmi dan upacara-upacara di Kanwil.
2. Menyelesaikan kebijakan-kebijakan Kanwil BRI yang berhubungan dengan pemberian jasa oleh pihak ketiga, seperti : telpon, listrik, dsb.
3. Mengelola Kas Porti.
4. Melakukan pembukuan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
5. Mengatur dan mengkoordinir Satpam, Sopir dan Pramubakti.

XVIII. Fungsi Arsip/Kesekretariatan

1. Menerima dan mendistribusikan surat-surat masuk Kanwil langsung ke alamat yang dituju surat.
2. Mengirim surat-surat keluar.
3. Mengelola Depo Arsip :
 - a. Menata kerjakan, mengamankan Arsip dari unit kerja yang di serahkan kepada Depo Arsip.
 - b. Melayani permintaan peminjaman arsip kepada yang berhak yang telah memenuhi prosedur sesuai ketentuan yang berlaku.

XIX. Kabag/Wakabag Operasional

1. Megkoordinasikan pelaksanaan fungsi operasional, fungsi teknologi dan sistem informasi serta fungsi Akuntansi Manajemen & Keuangan di Kanwil.
2. Melaksanakan pelayanan kas untuk unit kerja kanwil (sampai dengan di pindahnya fungsi pelayanan kas Kanwil kepada Kanca tertentu).
3. Melayani/meneruskan permintaan kas ke Kanpus untuk kanca pmngelola rekening giro BI.
4. Memberikan dukungan kepada Pinwil dalam manajemen kas Kanwil/Kanca.
5. Melakukan rekonsiliasi rekening antar kantor (RAK) regional.

Wewenang :

1. Melakuakan fiat bayar sesuai kewengannya.
2. Melakukan fiat pemindah bukuan sesuai kewenangannya
- 3 Melakukan fiat RAK

4. Memutus biaya dalam rangka instalasi, pemeliharaan, perbaikan dan operasi TSI di Kanwil/Kanca/Kanins/Sendik/dan BRI Unit di wilayahnya sesuai kewenangan yang diberikan.

XX. Staf Operasioanal

1. Membantu Kabag/Wakabag dalam pelaksanaan fungsi operasional, fungsi teknologi, dan sistem informasi serta fungsi Akuntansi Manajemen & Keuangan di Kanwil.
2. Membantu Kabag/Wakabag dalam manajemen kas Kanwil/Kanca.
3. Membantu Kabag/Wakabag dalam rekonsiliasi RAK.
4. Membuat laporan keuangan Kanwil, Kanca dan BRI Unit.
5. Membantu Kabag/Wakabag dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan akuntansi dan pelaksanaan ketentuan mengenai manajemen keuangan.

XXI. Fungsi/Kasie OPS

1. Memastikan pelaksanaan fungsi operasional di Kanwil berjalan sesuai dengan ketentuan.
2. Memastikan bahwa perangkat operasioanal telah untuk mendukung operasional Kanwil/Kanca/Kanins/Sendik/ dan BRI Unit.
3. Melaksanakan bantuan supervisi kepada Kanwil/Kanins/Sendik. Kanca/dan BRI Unit dalam menyelesaikan masalah operasional.
4. Memastikan terlaksananya sistem dan prosedur operasional Kanca Devisa.

XXII. Fungsi/Kasie AMK

1. Memastikan Fungsi Akuntansi Manajemen & Keuangan di Kanwil berjalan sesuai dengan ketentuan.
2. Memastikan pelayanan kas untuk unit kerja terkait terlaksana dengan baik.
3. Melayani/meneruskan permintaan kas ke kanpus bagi Kanca pengelola rekening giro BI.
4. Memberi dukungan kepada Kabag/Wakabag dalam manajemen kas Kanwil/Kanca.

XXIII. Fungsi/Kasie TSI

1. Memastikan pelaksanaan fungsi teknologi dan sistem informasi di Kanwil berjalan sesuai dengan ketentuan.
2. Mengkoordinasikan Implementor Kanwil untuk memberikan dukungan teknis sebagai "*response centre help desk*" terhadap permasalahan yang terjadi pada perangkat keras TSI guna mendukung kelancaran operasi TSI di Kanwil/Kanca/Kanins/Sendik/ dan BRI Unit.
3. Membantu Kabag/Wakabag dalam mengawasi pelaksanaan penyusunan standarisasi infrastruktur jaringan kerja Kanwil/Kanins/Sendik/Kanca /dan BRI Unit.

XXIV. Kabag/Wakabag ADK

1. Memonitor dan mengevaluasi Pelaksanaan KUP dan PPK serta melaporkan hasil monitoring dan evaluasi tersebut ke Kanpus serta memberi masukan untuk penyempurnaan KUP BRI dan PPK.

2. Mengadministrasikan PDKW yang di terbitkan Kanwil.
3. Melakukan evaluasi dan usulan terhadap kesesuaian kewenangan memutus bagi masing-masing pejabat pemutus kredit.
4. Memonitor, mengevaluasi, menganalisis dan memprediksi penyebaran dan kualitas portofolio pinjaman pada berbagai sektor, industri, perusahaan & mata uang.

Wewenang :

Mengimplementasikan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan para broker, perusahaan asuransi, perusahaan penilai, akuntan publik di wilayahnya sesuai dengan kebijakan Kanpus.

XXV. Staf ADK

1. Membantu Kabag/Wakabag dalam pelaksanaan KUP dan PPK serta melaorkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan tersebut ke Kanpus serta memberi masukan untuk penyempunaan KUP BRI dan PPK.
2. Membantu Kabag/Wakabag dalam melakukan evaluasi dan usulan terhadap kesesuaian kewenangan memutua bagi masing-masing pejabat pemutus kredit.
3. Ikut memonitor, mengevaluasi, menganalisis dan memprediksi penyebaran dan kualitas portofolio pinjaman pada berbagai sektor, industri, perusahaan & mata uang.

XXVI. Fungsi/Kasie ADK

1. Membantu Kabag/Wakabag dalam pelaksanaan KUP dan PPK serta melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan tersebut ke Kanpus serta memberi masukan untuk penyempurnaan KUP BRI dan PPK.
2. Memeliharakerjakan PDKW yang diterbitkan Kanwil.
3. Membantu Kabag/Wakabag dalam analisis penyebaran dan kualitas portofolio pinjaman pada berbagai sektor, industri, perusahaan & mata uang.

XXVII. Kepala Grup Analisis Kredit (ARK)

1. Memastikan bahwa putusan kredit yang hati-hati telah dilaksanakan untuk setiap kredit prakarsa Kanwil/Kanca yang diajukan kepada Grup Analisis Risiko Kredit Kanwil.
2. Merekomendasi/memutus kredit khususnya dari aspek analisis resiko kredit sesuai ketentuan PPK yang berlaku.
3. Memastikan pelaksanaan proses monitoring dan dokumentasi yang memadai sesuai dengan kebijakan perkreditan dan peraturan yang berlaku.

Wewenang :

1. Menerima paket usulan kredit Kelompok Bisnis Umum dari Divisi Bisnis yang telah dianalisis dan diputus oleh jajaran RM, melakukan pencacatan, melaksanakan proses analisis dan putusan kredit yang memadai sesuai kewenangan yang telah ditentukan, untuk meminimalkan risiko kredit.

Wewenang :

1. Melakukan perhitungan atas pembentukan/pembukuan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) atas portofolio kredit bermasalah Kanwil/Kanca yang dikelolanya.
2. Memutus restrukturisasi dan Penyelesaian Kredit Bermasalah putusan Kanwil sesuai dengan PPK yang berlaku.

XXX. Staf RPKB

1. Melakukan identifikasi atas kredit-kredit bermasalah dan yang telah atau akan dihapus bukukan secara perorangan serta memberikan rekomendasi penyelesaiannya, antarlain meliputi :
 - a. Menangani debitur kredit bermasalah.
 - b. Membuat analisis terhadap kredit-kredit bermasalah secara individual *case by case*.
 - c. Membuat dan mengusulkan strategi rencana tindak lanjut untuk penyelesaian kredit bermasalah.
 - d. Mengusulkan strategi alternatif bila mana strategi yang telah dilakukan tidak membawa hasil yang diharapkan.
2. Menjadi pemrakarsa dalam restrukturisasi dan penyelesaian kredit bermasalah putusan Kanwil sesuai dengan PPK yang berlaku.

2. Memastikan bahwa putusan kredit yang *prudent* telah dilaksanakan untuk setiap usulan kredit yang diajukan ke Grup ARK dalam batas kewenangan yang dimiliki.
3. Melaksanakan monitoring atas fasilitas pinjaman yang telah diputus sesuai kewenangannya, berdasarkan data/informasi yang diterima dari Bagian ADK atau berdasarkan informasi dari Bagian Bisnis, sebagai tindakan antisipatif kemungkinan terjadinya *non performing loan*.

XXIX. Kepala Grup Restrukturisasi dan Penyelesaian Kredit Bermasalah (RPKB)

1. Berdasarkan putusan pejabat yang berwenang, menerima pelimpah kredit klasifikasi Dalam Perhatian Khusus (DPK) yang mengalami *down grading* menjadi Kurang Lancar (KL), Diragukan (D) dan Macet (M) serta memberikan usulan restrukturisasinya antara lain meliputi :
 - a. Membuat memo analisis restrukturisasi kredit (MARK).
 - b. Membuat dan mengusulkan strategi/rencana tindak lanjut.
2. Memantau pelaksanaan strategi restrukturisasi kredit bermasalah sebagai berikut :
 - a. Melaporkan secara berkala Kepala Devisi RPKB maupun Pinwil tentang perkembangan dan realisasi restrukturisasi kredit yang dikelolanya.
 - b. Mengawasi register restrukturisasi kredit bermasalah yang menjadi tanggung jawabnya.
3. Mengadakan hubungan dengan pihak interen maupun eksteren dalam melakukan restrukturisasi kredit-kredit bermasalah.

XXXI. Tugas dan Tanggung Jawab *Legal Officer*

1. Memberi pelayanan dibidang hukum yang terkait dengan masalah-masalah hukum yang ada di wilayahnya.
2. Memberikan informasi, saran dan konsultasi hukum kepada pejabat Kanwil, Kanins, Sendik, Kanca, dan BRI Unit.
3. Mengadakan Penelitian/Pemeriksaan dan melakukan usulan-usulan atas peraturan-peraturan Perundang-undangan dan peraturan liannya yang berkaitan dengan BRI serta menetapkan kesimpulan apa yang bisa dilaksanakan Kanwil BRI.
4. Memberikan saran kepada semua unit kerja dan unit usaha Kanwil dalam menarik kesimpulan mengenai peraturan-peraturan perbankan dan peraturan lainnya dikaitkan dengan aktivitas dan operasi BRI.
5. Membantu meningkatkan pengetahuan hukum dan keahlian yang berkaitan dengan aktivitas BRI dan melakukan penyuluhan hukum kepada para pemakai...

Wewenang :

Dengan persetujuan Kepala Desk Hukum dan Pinwil melakukan kerjasama dengan pihak ke tiga dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang terkait dengan kepentingan BRI.

4.2 Laporan keuangan PT. BRI (persero) wilayah Achmad Yani Makassar .

Analisis kinerja keuangan merupakan suatu penilaian terhadap kinerja perusahaan pada waktu yang lalu dan prospek pada masa yang akan datang. Melalui analisis kinerja keuangan diharapkan menggunakan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan berisi data-data keuangan yang dibuat atas dasar fakta dari catatan akuntansi yang dicatat menurut prosedur dan sesuai dengan perinsip akuntansi yang lazim.

Tujuan dari analisis keuangan adalah untuk mengetahui posisi keuangan pada masa lalu dan sekarang yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan tentang kebijakan masa datang, tidak ada cara untuk mengukur kinerja perusahaan yang dapat memberikan jawaban yang mutlak. Hanya pengalaman relatif yang mungkin diperoleh dari analisa, dan ini disebabkan oleh kondisi usaha yang berbeda dari satu perusahaan dengan perusahaan lainnya dan dari satu jenis dengan jenis usaha lainnya.

PT. BRI (persero) Wilayah Achmad Yani Makassar sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyusun laporan keuangan tahunan yang merupakan kondisi keuangan yang dicapai dalam satu periode akuntansi. PT. BRI (persero) Wilayah Achmad Yani Makassar sebagai salah satu perusahaan milik negara wajib menyampaikan laporan keuangannya kepada pemerintah dalam hal ini Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara-Kepala badan Usaha Milik Negara. Informasi keuangan PT. BRI (persero) Wilayah Achmad Yani Makassar yang akan

disajikan pada lampiran (halaman : 69,90) selama dua tahun, yaitu tahun 2000 dan 2001 yang terdiri dari neraca ,laporan laba/rugi .

4.3 Analisis Kinerja Keuangan SK. Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara.

Analisis kinerja keuangan yang dilakukan menggunakan teknik analisis rasio. Rasio-rasio yang digunakan terdapat dalam Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN Republik Indonesia/Kepala Badan Pembina BUMN Nomor: Kep-215/M-BUMN/1999. Penerapan rasio-rasio tersebut adalah :

1. Cas Ratio (CAR)

Adalah Indikator untuk mengukur kemampuan perusahaan dengan menggunakan kas/setara kas untuk membayar kewajiban jangka pendek saat jatuh tempo :

$$CAR = \frac{\text{Kas dan Setara Kas}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100\%$$

Tabel
Cas Ratio (CAR)

Keterangan	Tahun 2000 (Rp)	Tahun 2001 (Rp)
Kas	141.725.509.797	168.871.802.185
Giro pada Bank Indonesia	68.077.496.380	17.077.996.380
Jumlah	209.802.006.177	185.944.420.263
Hutang Lancar	2.921.389.225.013	3.219.964.752.741
Cas Rasio (CAR)	$\frac{209.802.006.177}{2.921.389.225.013} \times 100\%$ = 7,18%	$\frac{185.944.450.263}{3.219.964.752.741} \times 100\%$ = 5,77%

Sumber : Laporan Keuangan PT. Bank Rakyat Indonesia (persero)

Wilayah Achmad Yani Makassar

Pada tahun 2000 nilai CAR sebesar 7,18% dan sesuai SK Menteri Perdaya Gunaan BUMN apabila CAR sebesar 7,18%, maka besar bobot penilaian sebesar 1. Ini disebabkan nilai tertinggi dari rasio ini adalah $CAR \geq 50,0\%$ atau untuk setiap hutang lancar Rp. 1 - dijamin dengan kas satuan kas Rp 0,50% atau lebih, sehingga rasio 7,18% kas/setara kas untuk membayar kewajiban jangka pendek pada saat jatuh tempo.

Pada tahun 2001 CAR sebesar 5,77% dan sesuai dengan SK Menteri Pendayagunaan BUMN apabila CAR sebesar 5,77% maka besarnya bobot penilai sebesar 1. Ini disebabkan nilai tertinggi dari ini adalah $CAR \geq 50,0\%$ atau setiap hutang lancar Rp 1 dijamin dengan kas setara kas Rp 0,50 atau lebih, sehingga rasio

5,77% berarti bahwa setiap Rp 1- hutang lancar di jamin dengan Rp 0,0577 kas/setara kas ini berarti perusahaan mampu mengoptimalkan penggunaan kas/setara kas untuk membayar kewajiban jangka pendek pada saat jatuh tempo.

Dari tahun 2000 ketahun 2001 nilai rasio mengalami penurunan dari 7,18% menjadi 5,77% meskipun berdasarkan SK Menteri Pendayagunaan BUMN bobot penilaian tetap sama 1. Ini disebabkan pada tahun 2001 kas setara kas mengalami penurunan, hutang lancar mengalami kenaikan

2. Net Working Capital to total Asset (WCA)

Adalah indikator untuk mengukur besarnya kontribusi modal kerja terhadap jumlah aktiva.

Rumus :

$$WCA = \frac{\text{Aktiva Lancar} - \text{Hutang Lancar}}{\text{Jumlah Aktiva}} \times 100\%$$

Tabel

Net Working Capital to Total Asset (WCA)

Keterangan	Tahun 2000 (Rp)	Tahun 2001 (Rp)
Aktiva Lancar	1.9679.941.383.576	2.057.046.077.753
Hutang Lancar	(2.921.389.225.013)	(3.219.964.752.741)
Jumlah	1241.447.841.437	1.162.918.674.988
Jumlah Aktiva	3.003.438.321.270	3.238.487.386.335
Net Working Capital To total Asset (WCA)	$\frac{1.241.447.841.437}{3.003.438.321.270} \times 100\%$	$\frac{1.162.918.674.988}{3.238.487.386.335} \times 100\%$
	- 41,33%	35,90%

Sumber : Laporan keuangan PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Wilayah Achmad Yani Makassar

Pada tahun 2000 nilai WCA 41,337 dan sesuai dengan SK Menteri pendayagunaan BUMN, apabila WCA sebesar 41,33%, maka besarnya bobot penilaian sebesar 4. Ini disebabkan nilai dari WCA = 40,0% hingga 59,9% sedangkan nilai tertinggi memberikan kontribusi modal kerja terhadap perusahaan sudah mampu memberikan kontribusi modal kerja terhadap aktivanya.

Pada tahun 2001 nilai WCA sebesar 35,90%, maka besarnya bobot penilaian sebesar 3. ini di sebabkan nilai WCA = 20,0% hingga 39,9%. sedangkan nilai tertinggi modal kerja terhadap jumlah aktivanya

Dari tahun 2000 ketahun 2001 nilai rasio mengalami penurunan dari 41,33% menjadi 35,90% dan bobot nilai yang dicapai juga mengalami penurunan dari 4 menjadi 3 ini disebabkan pada tahun 2001 aktiva lancar dan hutang lancar, mengalami penurunan di mana jumlah aktiva mengalami kenaikan.

3. Sales to Total Asset (STA)

Adalah indikator untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan operasi dengan memberdayakan jumlah aktivanya.

Rumus :

$$STA = \frac{\text{Pendapatan Operasi Neto}}{\text{Rata - rata Jumlah Aktiva}}$$

Tabel
Sales to Total Asset (STA)

keterangan	Tahun 2000 (Rp)	Tahun 2001 (Rp)
Pendapatan Operasi neto	107.002.348.511	2.057.046.077.753
Saldo Awal Total Aktiva	2.776.522.321.025	3.003.438.321.270
Saldo Akhir Total Aktiva	3.003.438.331.260	3.238.487.386.335
Jumlah total Aktiva	5.779.960.652.285	6.241.925.707.605
Rata-rata total Aktiva	<u>5.779.960.652.285</u>	<u>6.241.925.707.605</u>
	2	2
	2.889.980.326.142	3.120.962.853.802
Sales to Total Asset (STA)	<u>107.022.348.511</u>	<u>2.057.046.077.753</u>
	2.889.980.326.142	3.210.962.853.802
	0,03	0,64

Sumber laporan keuangan PT Bank Rakyat Indonesia (persero) wilayah Achmad Yani Makassar.

Pada tahun 2000 nilai STA sebesar 0,03 tidak sesuai dengan SK Menteri Perdayagunaan BUMN, diman STA nilai rasio terendah $STA < 1,70$ dengan bobot sebesar 0 (nol) ini menunjukkan bahwa perusahaan belum mampu mengoptimalkan jumlah aktiva untuk menghasilkan pendapatan operasi.

Pada tahun 2001 nilai STA sebesar 0,64 juga tidak sesuai dengan SK Menteri Perdayagunaan BUMN, dimana STA nilai rasio terendah $STA < 1,70$ dengan bobot nilai 0 (nol) ini menunjukkan bahwa perusahaan belum mampu mengoptimalkan jumlah aktiva untuk menghasilkan pendapatan operasi.

Dari tahun 2000 ketahun 2001 Sedang mengalami perubahan dari 0,03 menjadi 0,64 tetapi belum mampu mengoptimalkan jumlah aktivitya untuk menghasilkan pendapatan operasi.

4. Collection Periode (COP)

Adalah indikator untuk mengukur jumlah rata-rata waktu yang diperlukan untuk menagih suatu tagihan.

$$\text{Rumus COP} = \frac{\text{Rata - rata Piutang Usaha}}{\text{Pendapatan operasi neto}} \times 365 \text{ hari}$$

Tabel
Collection Periode (COP)

Keterangan	Tahun 2000 (Rp)	Tahun 2001 (Rp)
Saldo Awal Piutang Usaha	1.069.761.177.791	1.469.854.611.838
Saldo Akhir Piutang Usaha	1.469.854.611.838	1.869.948.045.885
Jumlah Piutang Usaha	2.539.615.789.629	3.339.802.657.723
Rata-rata Piutang Usaha	<u>2.539.615.789.629</u>	<u>3.339.802.657.723</u>
	2	2
Pendapatan Operasi	= 1.269.807.894.814	= 1669.901.328.861
Collection Period (COP)	107.002.348.511	96.046.328.736
	$\frac{1.269.807.894.814}{107.002.348.511} \times 365$	$\frac{1669.901.328.861}{96.046.328.738} \times 365$
	= 433 hari	= 634 hari

Sumber : Laporan keuangan PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Wilayah Achmad Yani Makassa

Pada tahun 2000 nilai COP 433 hari tidak sesuai dengan SK Menteri Pendayagunaan BUMN, dimana COP nilai rasio yang terkecil COP > 270 Hari dengan bobot nilai 0 (nol) ini berarti, perusahaan belum mampu melakukan penagihan yang lebih cepat kepada pelanggan (kreditur).



Pada tahun 2001 nilai COP 634 hari tidak sesuai dengan SK Menteri Pendayagunaan BUMN, dimana COP nilai rasio yang terkecil COP > 270 hari dengan bobot nilai 0 (nol) ini berarti, perusahaan belum mampu melakukan penagihan yang lebih cepat kepada pelanggan (kreditur)

Berdasarkan hasil perhitungan dari tahun 2000 ketahun 2001 perusahaan belum mampu melakukan penagihan yang lebih cepat kepada pelanggan (kreditur)

5. Return On Assets (ROA)

Adalah indikator untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan memberdayakan aktivitya pada akhir periode :

Rumus :

$$ROA = \frac{\text{Laba (rugi) sebelum pajak}}{\text{Rata-rata jumlah Aktiva}} \times 100\%$$

Tabel
Return On Asset (ROA)

Keterangan	Tahun 2000 (Rp)	Tahun 2001 (Rp)
Laba (rugi) sebelum pajak	107.185.180.329	192.083.177.902
Saldo Awal Total Aktiva	2.768.389.256.205	3.003.438.321.270
Saldo Akhir Total Akhir	3.003.438.321.270	3.238.487.386.335
Total Aktiva	6.006.876.642.540	6.241.925.707.605
Rata-rata total Aktiva	$\frac{6.006.876.642.540}{2}$	$\frac{6.241.925.707.605}{2}$
	3.003.438.321.270	3.120.962.835.802
Return On Assets (ROA)	$\frac{107.185.180.329}{3.003.438.321.270} \times 100\%$	$\frac{192.083.177.902}{3.120.962.835.802} \times 100\%$
	3,56%	6,15%

Pada Tahun 2000 nilai ROA sebesar 3,56%, tidak sesuai dengan SK Menteri Perdayagunaan BUMN, dimana ROA nilai Rasio terendah ROA < 6,55% dengan bobot nilai sebesar 0 (nol) ini berarti perusahaan tidak mampu mengoptimalkan pencapaian laba dengan memberdayakan aktivitya pada akhir periode

Pada tahun 2001 nilai ROA sebesar 6,15% juga tidak sesuai dengan SK Menteri Perdayagunaan BUMN, dimana ROA nilai rasio terendah ROA < 6,55% dengan bobot nilai sebesar 0 (nol) ini berarti perusahaan tidak mampu mengoptimalkan laba dengan memberdayakan aktivitya pada akhir periode

Berdasarkan hasil perhitungan dari tahun 2000 ketahun 2001 nilai yang di capai tidak sesuai dengan SK Menteri Perdayagunaan BUMN ini berarti perusahaan tidak mampu mengoptimalkan pencapaian laba dengan memberdayakan aktivitya diakhir tahun periode.

6. Net Profit margin (NPM)

Adalah indikator untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dari pendapatan operasi pada periode berjalan.

Rumus :

$$NPM = \frac{\text{Laba (rugi) sebelum Pajak}}{\text{Pendapatan Operasi Neto}} \times 100\%$$

Tabel
Net Profit margin (NPM)

Keterangan	Tahun 2000 (Rp)	Tahun 2001 (Rp)
Laba (rugi) sebelum pajak	107.185.180.329	192.083.177.902
Pendapatan Operasi Neto	107.022.348.511.	96.046.328.736
Net Profit Margin (NPM)	$\frac{107.185.180.329}{107.022.348.511} \times 100\%$	$\frac{192.083.177.902}{96.046.328.736} \times 100\%$
	= 1,00%	= 1,99%

Sumber : Laporan keuangan PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Wilayah Achmad Yani Makassa

Pada tahun 2000 nilai NPM sebesar 1,00% dan sesuai dengan SK Menteri Perdayagunaan BUMN. Apabila NPM sebesar 1,00% maka besarnya bobot penilaian sebesar 2. ini di sebabkan nilai NPM = 1,00% hingga 2,49% ini berarti perusahaan mampu mengoptimalkan perolehan laba dari pendapatan operasinya.

Pada tahun 2001 nilai NPM sebesar 1,99% dan sesuai dengan SK Menteri perdayagunaan BUMN apabila NPM sebesar 2, ini di sebabkan nilai NPM = 1,00 hingga 2,99% ini berarti perusahaan mampu mengoptimalkan perolehan laba dari pendapatan operasinya.

Berdasarkan perhitungan dari tahun 2000 ke tahun 2001 nilai rasio mengalami peningkatan dari 1,00% menjadi 1,99 meskipun sesuai dengan SK Menteri Perdayagunaan BUMN Besarnya bobot penilaian tetap 2, ini disebabkan pada tahun 2001 laba sebelum pajak mengalami peningkatan dan tahun 2001 pendapatan operasi mengalami penurunan.

Untuk mengetahui lebih jelas keadaan perkembangan rasio PT. BRI (persero) Wilayah Achmad Yani Makassar berdasarkan SK Menteri Pendayagunaan BUMN Republik Indonesia/ Kepala badan Pembina BUMN nomor : Kep-215/M – BUMN/1999 tentang penilaian tingkat kinerja BUMN nampak pada tabel dibawah ini.

No	Rasio	2000		2001		Nilai Tertinggi
		Nilai	Bobot Penilaian	Nialai	Bobot penilaian	
1	CAR	7,18%	1	5,77%	1	5
2	WCA	41,33%	4	35,90%	3	5
3	STA	0,03	0	0,64	0	7,5
4	COP	433 hari	0	634 hari	0	5
5	ROA	3,56%	0	6,15	0	5
6	NPM	1,00%	2	1,99%	2	5
Total			7		6	32,5

Sumber : data diolah sendiri

Interpretasi

- Berdasarkan hasil perhitungan. Cash ratio (CAR), dari tahun 2000 ketahun 2001 nilai rasio mengalami penurunan dari 7,18% menjadi 5,77%, meskipun sesuai dengan nilai SK Menteri Pendayagunaan besarnya bobot penilaian sebesar 1 ini disebabkan pada tahun 2001 kas/setara kas mengalami penurunan, hutang lancar mengalami kenaikan. Namun hal ini berarti perusahaan belum mampu memanfaatkan penggunaan kas /setara kas untuk membayar kewajiban jangka pendek pada saat jatuh tempo.
- Dari tahun 2000 ketahun 2001 nilai rasio WCA ini mengalami penurunan dari 41,33% menjadi 35,90%. Meskipun sudah sesuai dengan nilai SK Menteri Pendayagunaan BUMN bobot penilaian juga mengalami penurunan dari 4 menjadi 3, ini disebabkan pada tahun 2001 aktiva lancar dan hutang lancar mengalami penurunan dimana jumlah aktiva mengalami kenaikan. Ini berarti meskipun bobot penilaian dari tahun 2000 ketahun 2001 mengalami penurunan perusahaan masih mampu untuk memberikan kontribusi modal kerja terhadap jumlah aktivanya.
- Dari tahun 2000 ketahun 2001 nilai rasio sales total Asset (STA) sebesar 0.03 mengalami perubahan menjadi 0,64 pada tahun 2001 dan tetap tidak sesuai dengan nilai SK Menteri Negara pendayagunaan BUMN Dan bobot penilaian 0 tetap tahun 2000 ketahun 2001. Ini menunjukkan bahwa perusahaan belum mampu mengoptimalkan jumlah aktivanya untuk menghasilkan pendapatan operasi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Setelah melakukan analisis kinerja keuangan pada PT. BRI (persero) Wilayah Achmad Yani makassar dengan melakukan analisis berdasarkan SK Menteri pendayagunaan BUMN Repubelik Indonesia / Kepala badan pembinaan BUMN Nomor : Kep -215 / M. BUMN / 1999, maka ini disimpulkan sebagai berikut :

1. Kinerja keuangan PT. BRI (persero) Wilayah Achmad Yani makassar tahun 2000 dengan bobot penilain sebesar 7 digolongkan dalam klasifikasi tidak sehat sedangkan kinerja keuangan PT. BRI (persero) Wilayah Achmad Yani makassar tahun 2001 dengan bobot penilaian 6 juga digolongkan dalam klasifikasi tidak sehat. Bobot penilaian tersebut dari hasil penjumlahan nilai setiap indikator yaitu nilai CAR, nilai WCA, nilai STA, niali COP, nilai ROA dan nilai NPM.
2. Berdasarkan bobot penilaian yang telah diperoleh terdapat 1 indikator yang mengalami penurunan.
 - a. Net Working Capital to total Asset (WCA)
3. Berdasarkan bobot penilaian yang telah di peroleh terdapat 2 indikator yang bernilai tetap, yaitu :

- a. Cash Ratio (CAR)
 - b. Net Profit Margin (NPM)
4. Berdasarkan bobot penilaian yang telah di peroleh terdapat 3 indikator yang bernilai tetap dan tidak sesuai nilai indikator SK Menteri Pendayagunaan BUMN Republik Indonesia/ Kepala Badan Pembina BUMN : KEP 215 / M - BUMN : 1999.

5.2 SARAN

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan penulis maka dapat diajukan saran.

Dimana penilaian terhadap Kinerja Keuangan PT. BRI (Persero) Wilayah Achmad Yani makassar dengan menggunakan Indikator SK Menteri Negara Pendayagunaan BUMN Re publik Indonesia pada tahun 2000 dan tahun 2001 dengan bobot penilaian 7 dan 6 digolongkan dalam klasifikasi tidak sehat hendaknya ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Baridwan Zaki, September 1997, Intermediate Accounting, Edisi Ketujuh, Yogyakarta, Penerbit BPFE.
- Djarwanto Januari, 1996, Pokok-pokok Analisis laporan Keuangan, Edisi Pertama, Penerbit BPFE – Yogyakarta
- Ikatan Akuntan Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan, Salemba Empat november 1999
- Johny Styawan dan Mulyadi, Juni 2001, Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen : Sistem dan Pelipatgandaan Kinerja Perusahaan, Edisi Kedua, Penerbit Salemba Empat
- Mentri Negara Pendayagunaan BUMN, Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN Republik Indonesia, Kepala Badan Pembina BUMN Nomor : Kep-215/M-BUMN/1999 Tanggal 27 September 1999 Tentang Penilaian Kinerja Perusahaan
- Munawir. S. 1997, Analisa Laporan Keuangan, Edisi Keempat, Yogyakarta, Penerbit Liberty
- Mohammad Muslich, November 1997, Manajemen Keuangan Modern : Analisis, Perencanaan, dan kebijakan, Penerbit Bumi Aksara jakarta
- Sofyan S. Harahap. November 1999, Akuntansi Islam, Cetakan Kedua, Jakarta, Penerbit Bumi Aksara
- Syafuddin Alwi, 2001 Strategi Keuangan kompetitif, Edisi Pertama, BPFE Yogyakarta
- T. Hani Handoko, 1997, Manajemen, Edisi Kedua, Yogyakarta

PT. BRI (PERSERO)

NERACA

31 DESEMBER 2000

(Jutaan Rp)

1. AKTIVA

1.1 Kas	Rp 141.725,-
1.2 Giro pada Bank Indonesia	Rp 68.077,-
1.3 Giro pada bank lain	Rp 98,-
1.4 Surat-surat berharga	Rp 254,-
1.5 Kredit yang diberikan	Rp 1.469.785,-
1.6 Pendapatan yang masih akan diterima	Rp 69,-
1.7 Biaya yang dibayar dimuka	Rp 3.322,-
1.8 Aktiva tetap	Rp 90.008,-
Akumulasi penyusutan aktiva tetap	Rp 38.107,-
1.9 Aktiva lain-lain	Rp 1.268.203,-
Jumlah Aktiva	Rp 3.003.438,-

2. PASIVA

2.1 Giro	Rp 239.064,-
2.2 Kewajiban segera lainnya	Rp 72.052,-
2.3 Tabungan	Rp 1.959.101,-
2.4 Deposito berjangka	Rp 651.170,-
2.5 Pinjaman yang diterima	Rp 76.336,-
2.6 ¹ Beban yang masih harus dibayar	Rp 829,-
2.7 Kewajiban lain-lainnya	Rp 4.882,-
Jumlah Pasiva	Rp 3.003.438,-

f-

PT. BRI (PERSERO)**NERACA****31 DESEMBER 2001****(Jutaan Rp)****1. AKTIVA**

1.1 Kas	Rp 168.871,-
1.2 Giro pada Bank Indonesia	Rp 17.073,-
1.3 Giro pada bank lain	Rp 6,-
1.4 Surat-surat berharga	Rp 1.271,-
1.5 Kredit yang diberikan	Rp 1.869.822,-
1.6 Pendapatan yang masih akan diterima	Rp 66,-
1.7 Biaya yang dibayar dimuka	Rp 3.992,-
1.8 Aktiva tetap	Rp 95.015,-
Akumulasi penyusutan aktiva tetap	Rp 61.040,-
1.9 Aktiva lain-lain	Rp 1.145.326,-
Jumlah Aktiva	Rp 3.238.487,-

2 PASIVA

2.1 Giro	Rp 237.771,-
2.2 Kewajiban segera lainnya	Rp 53.654,-
2.3 Tabungan	Rp 2.371.365,-
2.4 Deposito berjangka	Rp 557.173,-
2.5 Pinjaman yang diterima	Rp 9.373,-
2.6 Beban yang masih harus dibayar	Rp 1.016,-
2.7 Kewajiban lain-lainnya	Rp 8.133,-
Jumlah Pasiva	Rp 3.238.487,-



PT. BRI (PERSERO)

Laporan Laba - Rugi

Periode Januari s/d Desember 2000

(Jutaan Rp)

I	Pendapatan dan beban operasional		
1.	Pendapatan Bunga		
1.1	Bunga yang diperoleh	Rp 463.609,-	
1.2	Provisi dan komisi kredit	Rp 7.441,-	
			Rp 471.050,-
2.	Beban bunga		
2.1	Bunga yang di bayar	Rp 264.246,-	
2.2	Hadiah	Rp 8.257,-	
2.3	Provisi dan komisi dibayar Untuk mendapatkan dana	Rp 9,-	
			(Rp 272.914,-)
3.	Pendapatan bunga neto		Rp 198.136,-
4.	Pendapatan dan beban lainnya		
4.1	provisi dan komisi yang diterima selain dari pemberian kredit	Rp 1.827,-	
4.2	Provisi dan kondisi yang dibayar Selain untuk penerimaan dana	Rp 7.904,-	
4.3	Pendapatan/beban dan provisi dan komisi neto	Rp 6.076,-	
4.4	Pendapatan lain	Rp 4.897,-	
4.5	Beban overhead		
a.	beban umum dan administrasi	Rp 5.393,-	
b.	beban personalia	Rp 62.046,-	
c.	beban lain	Rp 2.968,-	
4.6	Pendapatan/beban lain neto		(Rp 91.114,-)
5.	Pendapatan operasional neto	Rp 107,-	
II	Pendapatan dan beban non operasional		
1.	Pendapatan non operasional		
1.1	Keuntungan penjualan aktiva tetap	Rp 229,-	
	Lainnya	Rp 1.288,-	
	Jumlah pendapatan non operasional		Rp 1.518,-
2.	Beban non operasional		
2.1	Kerugian penjualan aktiva tetap	Rp 218,-	
2.2	Lainnya	Rp 1.137,-	
	Jumlah beban non operasional		(Rp 1.355,-)
3.	Pendapatan/beban non operasional		Rp 162,-
III	Laba (rugi)		
1.	Jumlah Pendapatan dan beban Operasional		Rp 107.022,-
2.	Jumlah pendapatan dan beban non operasional		(Rp 162,-)
3.	Laba (rugi) sebelum pajak tahun berjalan		Rp 107.185,-
4.	Laba (rugi) setelah pajak		Rp 107.185,-

PT. BRI (PERSERO)

Laporan Laba - Rugi

Periode Januari s/d Desember 2001 (Jutaan Rp)

I Pendapatan dan beban operasional		
1. Pendapatan Bunga		
1.1 Bunga yang diperoleh	Rp 579.969,-	
1.2 Provisi dan komisi kredit	Rp <u>11.062,-</u>	
		Rp 519.032,-
2. Beban bunga		
2.1 Bunga yang di bayar	Rp 329.692,-	
2.2 Hadiah	Rp 9.652,-	
2.3 Provisi dan komisi dibayar Untuk mendapatkan dana	Rp12,-	
		(Rp 339.357,-)
3. Pendapatan bunga neto		Rp 251.675,-
4. Pendapatan dan beban lainnya		
4.1 provisi dan komisi yang diterima selain dari pemberian kredit	Rp 2.309,-	
4.2 Provisi dan kondisi yang dibayar Selain untuk penerimaan dana	Rp 8.425,-	
4.3 Pendapatan/beban dan provisi dan komisi neto	Rp 6.116,-	
4.4 Pendapatan lain	Rp 13.451,-	
4.5 Beban overhead		
1. beban umum dan administrasi	Rp 10.590,-	
2. beban personalia	Rp 86.825,-	
3. beban lain	Rp <u>27.909,-</u>	
4.6 Pendapatan/beban lain neto		(Rp 155.628,-)
5. Pendapatan operasional neto		Rp 96.046,-
II Pendapatan dan beban non opsional		
1. Pendapatan non operasional		
1.1 Keuntungan penjualan aktiva tetap	Rp 199,-	
Lainnya	Rp <u>1.033,-</u>	
Jumlah Pendapatan non operasional		Rp 1.232,-
2. Beban non operasional		
2.1 Kerugian penjualan aktiva tetap	Rp 21,-	
2.2 Lainnya	Rp <u>501,-</u>	
Jumlah beban non operasional		(Rp 522,-)
3. Pendapatan/beban non operasional		Rp 710,-
1. Jumlah pendapatan dan beban operasional		Rp 96.046,-
2. Jumlah pendapatan dan beban non operasional		(Rp 710,-)
3. Laba (rugi) sebelum pajak tahun berjalan		Rp 192.083,-
4. Laba (rugi) setelah pajak		Rp 192.083,-

+

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN BUMI
REPUBLIK INDONESIA

Keputusan No. 11/KEP/MB/1999
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN BADAN USAHA MILIK
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG KEPALA BADAN PEMBINA BADAN
USAHA MILIK NEGARA
NOMOR : KEP- 21/MB/1999

Indikator dan nilainya

Indikator	Nilai
1. Debt Equity Ratio (DER)	75
2. Cash Ratio (CAR)	50
3. Net Working Capital to Total Assets (NCA)	50
4. Inventory Turn Over (ITO)	50
5. Collection Period (COP)	50
6. Sales to Total Assets (STA)	75
7. Return on Equity (ROE)	50
8. Return on Assets (ROA)	50
9. Net Profit Margin (NPM)	100 5,0

Alasan-balasan yang digunakan dalam menentukan nilai masing-masing indikator dibedakan berdasarkan jenis industri dasar BUMN sebagai berikut:

1. Industri dasar dan pengolah sumber daya alam
2. Industri manufaktur
3. Industri perdagangan dan jasa lain

Rumus-rumus yang digunakan untuk menghitung indikator

Debt equity ratio (DER)	$\frac{\text{Total liabilities}}{\text{Shareholder's equity}}$	
Cash ratio (CAR)	$\frac{\text{Cash and short term securities}}{\text{Current liabilities}}$	X 100%
Net working capital to total assets (NCA)	$\frac{\text{Current assets} - \text{Current liabilities}}{\text{Total assets}}$	X 100%
Inventory turn over (ITO)	$\frac{\text{Cost of goods sold}}{\text{average inventories}}$	
Sales to total assets (STA)	$\frac{\text{Net Sales}}{\text{average total assets}}$	
Collection period (COP)	$\frac{\text{Receivables}}{\text{Net sales}}$	X 365 days
Return on equity (ROE)	$\frac{\text{PAT}}{\text{average equity}}$	X 100%
Return on assets (ROA)	$\frac{\text{EBIT-tax}}{\text{average total assets}}$	X 100%
Net profit Margin	$\frac{\text{EBIT-tax}}{\text{Net Sales}}$	X 100%

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN BUMIH
 REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Batasan indikator dan nilainya

A. Nilai debt equity ratio (DER)

Nilai	Industri		
	Industri Dasar dan Pengolah Sumber Daya Alam	Industri Manufaktur	Industri Perdagangan dan Jasa Lain
1,5	DER < 1,70	DER < 6,71	DER < 7,5
3,0	DER = 1,70 hingga 1,77	DER = 6,70 hingga 6,70	DER = 7,39 hingga 8,74
6,0	DER = 1,99 hingga 1,99	DER = 7,45 hingga 7,45	DER = 7,73 hingga 4,34
1,75	DER = 0,891 hingga 1,00	DER = 1,79 hingga 2,44	DER = 1,96 hingga 2,77
6,0	DER = 0,55 hingga 0,90	DER = 0,93 hingga 1,78	DER = 0,99 hingga 1,95
4,5	DER = 0,11 hingga 0,54	DER = 0,47 hingga 1,01	DER = 0,44 hingga 0,94
3,0	DER = 0,05 hingga 0,10	DER = 0,10 hingga 0,26	DER = 0,60 hingga 0,44
0,0	DER = 0,00	DER = 0,00	DER = 0,00

B. Nilai cash ratio (CAR)

Nilai	Industri		
	Industri Dasar dan Pengolah Sumber Daya Alam	Industri Manufaktur	Industri Perdagangan dan Jasa Lain
0	CAR < 0,0%	CAR < 0%	CAR < 0%
1	CAR = 0,0% hingga 5,5%	CAR = 0,0% hingga 9,9%	CAR = 0,0% hingga 9,9%
2	CAR = 10,0% hingga 14,9%	CAR = 10,0% hingga 24,9%	CAR = 10,0% hingga 19,9%
3	CAR = 15,0% hingga 24,9%	CAR = 25,0% hingga 44,9%	CAR = 20,0% hingga 34,9%
4	CAR = 25,0% hingga 44,9%	CAR = 45,0% hingga 64,9%	CAR = 35,0% hingga 49,9%
5	CAR > 45%	CAR > 65%	CAR > 50,0%

C. Nilai net working capital to total assets (WCA)

Nilai	Industri		
	Industri Dasar dan Pengolah Sumber Daya Alam	Industri Manufaktur	Industri Perdagangan dan Jasa Lain
0	WCA < 0,0%	WCA < 0,0%	WCA < 0,0%
1	WCA = 0,0% hingga 0,9%	WCA = 0,0% hingga 7,4%	WCA = 0,0% hingga 9,9%
2	WCA = 1,0% hingga 1,9%	WCA = 7,5% hingga 14,9%	WCA = 10,0% hingga 19,9%
3	WCA = 2,0% hingga 3,9%	WCA = 15,0% hingga 29,9%	WCA = 20,0% hingga 39,9%
4	WCA = 4,0% hingga 5,9%	WCA = 30,0% hingga 44,9%	WCA = 40,0% hingga 59,9%
5	WCA > 6,0%	WCA > 45,0%	WCA > 60,0%

D. Nilai inventory turn over (ITO)

Nilai	Industri		
	Industri Dasar dan Pengolah Sumber Daya Alam	Industri Manufaktur	Industri Perdagangan dan Jasa Lain
0	ITO < 5,50	ITO < 5,00	ITO < 5,00
1	ITO = 5,50 hingga 6,99	ITO = 5,00 hingga 5,49	ITO = 5,50 hingga 5,99
2	ITO = 7,00 hingga 8,49	ITO = 5,50 hingga 5,99	ITO = 6,00 hingga 5,49
3	ITO = 8,50 hingga 9,99	ITO = 6,00 hingga 6,49	ITO = 6,50 hingga 6,99
4	ITO = 10,00 hingga 10,49	ITO = 6,50 hingga 6,99	ITO = 7,00 hingga 7,49
5	ITO > 10,50	ITO > 7,50	ITO > 7,50

MENTERI NEGARA PNDAYAGUNAAN BISNIS
REPUBLIK INDONESIA

Nilai sales to total assets (STA)

Nilai	Industri		
	Industri Dasar dan Pengolah Sumber Daya Alam	Industri Manufaktur	Industri Perdagangan dan Jasa Lain
0,0	STA < 0,40	STA < 0,80	STA < 1,70
1,5	STA = 0,40 hingga 0,49	STA = 0,80 hingga 0,89	STA = 1,70 hingga 1,79
3,0	STA = 0,50 hingga 0,54	STA = 0,90 hingga 0,99	STA = 1,80 hingga 1,89
4,5	STA = 0,55 hingga 0,59	STA = 1,00 hingga 1,09	STA = 1,90 hingga 1,99
6,0	STA = 0,60 hingga 0,74	STA = 1,10 hingga 1,19	STA = 2,00 hingga 2,09
7,5	STA ≥ 0,75	STA = 1,20	STA ≥ 2,10

Nilai collection period (COP)

Nilai	Industri		
	Industri Dasar dan Pengolah Sumber Daya Alam	Industri Manufaktur	Industri Perdagangan dan Jasa Lain
0	COP > 300 hari	COP > 215 hari	COP > 270 hari
1	COP = 240 hingga 299	COP = 175 hingga 244	COP = 210 hingga 269
2	COP = 180 hingga 239	COP = 165 hingga 224	COP = 150 hingga 209
3	COP = 120 hingga 179	COP = 105 hingga 154	COP = 90 hingga 149
4	COP = 60 hingga 119	COP = 45 hingga 104	COP = 30 hingga 89
5	COP < 60	COP < 15	COP < 30

Nilai return on equity (ROE)

Nilai	Industri		
	Industri Dasar dan Pengolah Sumber Daya Alam	Industri Manufaktur	Industri Perdagangan dan Jasa Lain
0	ROE < 6,51%	ROE < 7,74%	ROE < 12,53%
1	ROE = 6,51% hingga 8,13%	ROE = 7,74% hingga 9,67%	ROE = 12,53% hingga 15,67%
2	ROE = 8,14% hingga 10,17%	ROE = 9,68% hingga 12,09%	ROE = 15,68% hingga 19,58%
3	ROE = 10,18% hingga 12,71%	ROE = 12,10% hingga 15,11%	ROE = 19,59% hingga 24,48%
4	ROE = 12,72% hingga 15,89%	ROE = 15,12% hingga 18,89%	ROE = 24,49% hingga 30,59%
5	ROE = 15,90%	ROE = 18,90%	ROE ≥ 30,60%

Nilai return on assets (ROA)

Nilai	Industri		
	Industri Dasar dan Pengolah Sumber Daya Alam	Industri Manufaktur	Industri Perdagangan dan Jasa Lain
0	ROA < 4,87%	ROA < 3,93%	ROA < 6,55%
1	ROA = 4,87% hingga 6,08%	ROA = 3,93% hingga 4,91%	ROA = 6,55% hingga 8,19%
2	ROA = 6,09% hingga 7,61%	ROA = 4,92% hingga 6,13%	ROA = 8,19% hingga 10,23%
3	ROA = 7,62% hingga 9,51%	ROA = 6,14% hingga 7,67%	ROA = 10,24% hingga 12,79%
4	ROA = 9,52% hingga 11,89%	ROA = 7,68% hingga 9,59%	ROA = 12,80% hingga 15,89%
5	ROA ≥ 11,90%	ROA ≥ 9,60%	ROA ≥ 16,00%

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN BUMIH
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Nilai net profit margin (NPM)

Nilai	Industri		
	Industri Dasar dan Pengolah Sumber Daya Alam	Industri Manufaktur	Industri Perdagangan dan Jasa Lain
0	NPM < 0,00%	NPM < 0,00%	NPM < 0,00%
1	NPM = 0,00% hingga 0,49 %	NPM = 0,00% hingga 1,99 %	NPM = 0,00% hingga 0,99 %
2	NPM = 0,50% hingga 1,99%	NPM = 2,00% hingga 3,49%	NPM = 1,00% hingga 2,49%
3	NPM = 2,00% hingga 3,49%	NPM = 3,50% hingga 4,99%	NPM = 2,50% hingga 3,99%
4	NPM = 3,50% hingga 4,99%	NPM = 5,00% hingga 6,99%	NPM = 4,00% hingga 5,49%
5	NPM ≥ 5,00%	NPM ≥ 7,00%	NPM ≥ 5,50%

Indikator kinerja keuangan

Kinerja keuangan adalah hasil penjumlahan nilai setiap indikator, yaitu Nilai debt ratio + cash ratio + Nilai net working capital to total assets + Nilai inventory turn over + Nilai receivables to total assets + Nilai sales to total assets + Nilai return on equity + Nilai return on assets

Indikator DUMN Industri Perdagangan dan Jasa Lain yang didalam data keuangannya menyebutkan persediaan = 0 atau tidak memiliki persediaan, maka nilai inventory turn over dan nilai kinerja keuangannya adalah jumlah nilai indikator kinerja keuangan dikalikan dengan nilai persediaan.

Kategori kinerja keuangan

Kategori kinerja keuangan adalah sebagai berikut :

- 1. Sangat Sehat bila nilai kinerja keuangan > 41,2
- 2. Sehat bila nilai kinerja keuangan > 26,0 s/d 41,2
- 3. Kurang Sehat bila nilai kinerja keuangan > 12,4 s/d 26,0
- 4. Tidak Sehat bila nilai kinerja keuangan ≤ 12,4